



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 3

Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

- a. Lampiran I Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Lampiran II Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Kesehatan;
- c. Lampiran III Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Lampiran IV Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Lampiran V Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Lampiran VI Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Sosial;
- g. Lampiran VII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Lampiran VIII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

- i. Lampiran IX Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Lampiran X Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Lampiran XI Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Lampiran XII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Perhubungan;
- m. Lampiran XIII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Lampiran XIV Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- o. Lampiran XV Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Lampiran XVI Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- q. Lampiran XVII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- r. Lampiran XVIII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Sekretariat Daerah;
- s. Lampiran XIX Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Sekretariat DPRD;
- t. Lampiran XX Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- u. Lampiran XXI Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Keuangan Daerah;
- v. Lampiran XXII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- w. Lampiran XXIII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Inspektorat Daerah;

- x. Lampiran XXIV Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Jatipuro;
- y. Lampiran XXV Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Jatiyoso;
- z. Lampiran XXVI Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Jumantono;
- aa. Lampiran XXVII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Jumapolo;
- bb. Lampiran XXVIII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Matesih;
- cc. Lampiran XXIX Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Tawangmangu;
- dd. Lampiran XXX Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Ngargoyoso;
- ee. Lampiran XXXI Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Karangpandan;
- ff. Lampiran XXXII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Karanganyar;
- gg. Lampiran XXXIII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Tasikmadu;
- hh. Lampiran XXXIV Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Jaten;
- ii. Lampiran XXXV Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Colomadu;
- jj. Lampiran XXXVI Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Gondangrejo;
- kk. Lampiran XXXVII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Mojogedang;
- ll. Lampiran XXXVIII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Kebakkramat;
- mm. Lampiran XXXIX Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Kerjo;
- nn. Lampiran XL Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Jenawi;
- oo. Lampiran XLI Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2021
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi Bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang diorganisir oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional yang dituangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Target SDGs yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu Tujuan kedua, tanpa kelaparan yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, Tujuan ketiga, Kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia, Tujuan 5, kesetaraan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan, Tujuan 6, air bersih dan sanitasi layak, yaitu menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) kesehatan mempunyai peran yang sangat significant dalam mengukur keberhasilannya. IPM adalah indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik, yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. Indeks kesehatan dalam IPM diukur melalui Angka harapan Hidup. Kesehatan dianggap sebagai investasi yang dapat meningkatkan produktifitas individu dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, serta norma – norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Selaras dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, di Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2013 telah tersusun Sistem Kesehatan Kabupaten (SKK) Karanganyar yang dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Karanganyar dengan Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Kesehatan Nasional, penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Karanganyar harus diselaraskan dengan penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Kesehatan Nasional Kesehatan. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Karanganyar juga mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional yang telah ditetapkan pada Tahun 2009, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/160/II/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014, serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 ini adalah penjabaran Renstra (Rencana Strategis) tahun 2018 – 2023 yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
 16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16).
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2032;
 29. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Karanganyar Tahun 2021 disusun dengan maksud :

1. Memberikan arah pembangunan kesehatan daerah jangka pendek.
2. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan daerah serta instrumen bagi APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
3. Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Karanganyar Tahun 2020 disusun dengan tujuan :

1. Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah melalui kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan;
2. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki;

3. Mewujudkan pembangunan yang mengedepankan *Triple Track Strategy Plus* (*pro poorpro job, pro growth* dan *pro environment*) dengan memperhatikan kearifan local (*local wisdom*);
4. Menjadikan alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

I.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- II.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3 Isu Isu Penting / Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- III.1 Telaahan terhadap arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan Topuksi Perangkat Daerah
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Besaran Alokasi Anggaran Kesehatan di luar gaji di Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2019 sebesar 14,06%, sudah diatas amanah UU 36 tahun 2009 yaitu minimal 10% APBD dan tahun 2020 sebesar 15,89%, sehingga terdapat kenaikan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan.

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (N-2) Dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (N-1) Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan RKPD permendagri 13	Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Akhir Priode RPJMD		Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi sesuai Permendagri 090				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2021 yang dievaluasi (%)		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9				14=10+11+12+13		15=14/9*100		
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			30.444.400.000		14.081.054.141	80		264.703.098.000		78.771.211.900		76.659.699.260		97,32

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	5.737.000.000		1.819.549.560								
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100	536.995.000	100	536.995.600		522.837.000		97,36
		Penyusunan perencanaan program	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan program					4	296.995.000	4	335.192.800		326.927.200		97,53
		Penyusunan perencanaan program	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya RKA penetapan dan perubahan SKPD					2	20.000.000	2	20.000.000		20.000.000		100,00
		Penyusunan perencanaan program	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunya DPA penetapan dan perubahan SKPD					2	20.000.000	2	20.000.000		20.000.000		100,00
		Penyusunan perencanaan program	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya dokumen laporan (jenis)					6	100.000.000	6	61.802.800		59.909.800		96,94

		Pelaksanaan SPIP dan Reformasi Birokrasi	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen SPIP dan Reformasi Birokrasi				2	100.000.000	2	100.000.000	96.000.000	96,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terealisasi capaian anggaran OPD				80	98.622.284.000		74.969.252.000	73.208.137.199	97,65
		Penyusunan laporan pengelolaan keuangan SKPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN				14	98.022.284.000		74.369.252.000	72.634.904.799	97,67
		Penyusunan laporan pengelolaan keuangan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya dokumen laporan keuangan				5 dokumen	250.000.000		250.000.000	245.463.000	98,19
		Penyusunan laporan pengelolaan keuangan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan bulanan BLUD berupa SP3PB				12	200.000.000		200.000.000	199.686.100	99,84
		Penyusunan laporan pengelolaan keuangan SKPD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Prognosis Realisasi Anggaran BLUD				1 dokumen	150.000.000		150.000.000	128.083.300	85,39
				Terlaksananya pembinaan BLUD				1					
2			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen BMD sesuai standar				100	200.000.000		200.000.000	195.957.000	97,98

	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunya laporan semesteran					1	200.000.000		200.000.000		195.957.000		97,98
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Tersusunnya dokumen persediaan dan aset tetap (jenis)					2							
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	4.230.000.000		8.363.834.874								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai					100	244.106.000		216.800.000		210.738.000		97,20
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	persentase tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya					100	53.806.000		-		-		
	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase Terlaksanakannya pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan					100	121.800.000		148.300.000		144.060.000		97,14
	Pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan														
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasi					2	50.000.000		50.000.000		50.000.000		100,00

3		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan					3	18.500.000	18.500.000		16.678.000	90,15
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor					100	509.803.500	599.803.800	-	526.898.414	87,85
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelancaran koordinasi dan komunikasi (penyediaan makan minum rapat/kegiatan)					12	258.430.000	258.430.000		245.052.000	94,82
4								12					
									1				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediaanya Barang cetak dan penggandaan					1	75.000.000	75.000.000		72.790.000	97,05
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase jumlah draft produk hukum bidang kesehatan					100	26.373.500	116.373.800		99.763.800	85,73

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral dan Laporan hasil perjalanan dinas (kali)					100	150.000.000		150.000.000		109.292.614		72,86
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana OPD					100	438.560.000		1.121.362.500		1.028.561.000		91,72
		Pengadaan kendaraan ambulance	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah tersedianya kendaraan dinas roda 2					17	425.000.000		950.000.000		866.661.000		91,23
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor					1	13.560.000		171.362.500		161.900.000		94,48
		Pengadaan peralatan gedung kantor														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100	8.229.900.000	3.115.505.519								

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor					100	594.500.000		657.000.000		617.081.542		93,92	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat kabar					12	34.500.000		34.500.000		33.798.387		97,97	
				Terlaksananya Kelancaran surat menyurat					12								
				Terlaksananya pengiriman surat/dokumen/paket					2000								
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telpon, dan internet					12	560.000.000		622.500.000		583.283.155		93,70	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur		100	12.247.500.000	782.164.188									

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya sarana prasarana barang milik daerah					100	244.997.500		469.998.000		349.489.105		74,36
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpeliharanya kendaraan Dinas (roda 4)					100	110.000.000		210.000.000		99.794.005		47,52
				presentase jumlah kendaraan yang proses perizinan/pajak kendaraan dinas/operasional					100							
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	presentase Tepeliharanya gedung kantor (gedung)					100	74.997.500		129.998.000		129.653.900		99,74
				Terwujudnya rehab gedung kantor					1					-		

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase tenwujudnya pemeliharaan peralatan kantor (Genset, AC, komputer, printer, telephon, air, listrik, wifi, LCD, dll)					100	60.000.000		130.000.000		120.041.200		92,34
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai IKM					80	163.311.852.000		-		0		#DIV/0!
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai IKM					76	118.000.000.000				-		#DIV/0!
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai IKM					80	45.311.852.000				-		#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jatipuro	BLUD Pusk. Jatipuro	Nilai IKM					80	1.892.000.000		1.892.000.000		1.525.775.652		80,64
			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91							#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jatiyoso	BLUD Pusk. Jatiyoso	Nilai IKM					80	2.426.769.000		2.426.769.000		1.579.520.103		65,09

			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91						#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jumapolo	BLUD Pusk. Jumapolo	Nilai IKM					80	2.491.377.000		2.491.377.000		1.766.264.567	70,90
			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91						#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jumantono	BLUD Pusk. Jumantono	Nilai IKM					80	2.758.867.000		2.758.867.000		2.222.024.853	80,54
			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91						#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Matesih	BLUD Pusk. Matesih	Nilai IKM					80	2.206.800.000		2.206.800.000		2.200.468.333	99,71
			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91						#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tawangmangu	BLUD Pusk. Tawangmangu	Nilai IKM					80	2.017.300.000		2.017.300.000		1.787.782.988	88,62

			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91						#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngargoyoso	BLUD Pusk. Ngargoyoso	Nilai IKM					80	2.043.749.000	2.043.749.000	1.752.517.367		85,75	
			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91					#DIV/0!	
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangpandan	BLUD Pusk. Karangpandan	Nilai IKM					80	2.625.013.000	2.625.013.000	1.988.845.484		75,77	
			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91					#DIV/0!	
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karanganyar	BLUD Pusk. Karanganyar	Nilai IKM					80	2.526.826.000	2.526.826.000	2.376.917.055		94,07	
			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91					#DIV/0!	
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tasikmadu	BLUD Pusk. Tasikmadu	Nilai IKM					80	2.139.290.000	2.139.290.000	1.732.617.196		80,99	

			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91						#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jaten I	BLUD Pusk. Jaten I	Nilai IKM					80	1.759.800.000	1.759.800.000		1.366.923.611		77,67
			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91						#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jaten II	BLUD Pusk. Jaten II	Nilai IKM					80	1.250.160.000	1.250.160.000		988.399.887		79,06
			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91						#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Colomadu I	BLUD Pusk. Colomadu I	Nilai IKM					80	1.312.083.000	1.312.083.000		1.118.536.814		85,25
			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91						#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Colomadu II	BLUD Pusk. Colomadu II	Nilai IKM					80	1.159.457.000	1.159.457.000		1.207.015.607		104,10

			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91						#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gondangrejo	BLUD Pusk. Gondangrejo	Nilai IKM					80	2.794.627.000	2.794.627.000		2.344.151.133		83,88
			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91						#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kebakkramat I	BLUD Pusk. Kebakkramat I	Nilai IKM					80	3.002.958.000	3.002.958.000		1.912.232.040		63,68
			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91						#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kebakkramat II	BLUD Pusk. Kebakkramat II	Nilai IKM					80	1.382.177.000	1.382.177.000		1.291.384.754		93,43
			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91						#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mojogedang I	BLUD Pusk. Mojogedang I	Nilai IKM					80	2.733.508.000	2.733.508.000		1.914.328.844		70,03

			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91						#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mojogedang II	BLUD Pusk. Mojogedang II	Nilai IKM					80	1.543.437.000	1.543.437.000		1.372.001.482		88,89
			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91						#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kerjo	BLUD Pusk. Kerjo	Nilai IKM					80	3.053.490.000	3.053.490.000		2.036.835.319		66,71
			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91						#DIV/0!
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jenawi	BLUD Pusk. Jenawi	Nilai IKM					80	2.192.164.000	2.192.164.000		1.511.366.054		68,94
			Kinerja Pelayanan Puskesmas					91						#DIV/0!

	Program Sumber Daya Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas Pelayanan kesehatan berizin yang memenuhi kompetensi dan kewenangan sesuai standar		40	747.297.654.700	18.276.965.982	30	172.215.694.000				-	#DIV/0!
	Program Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasyankes yang terakreditasi minimal utama	%	40	810.799.691.232	24.058.615.385	30	73.188.696.900	115.466.694.100			86.024.289.330	74,50
			Persentase penyakit tidak menular tertangani	%				100						
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Prevalensi HIV	<0,5	1 per 1000 pddk	27.700.000.000	3.694.389.050	<0,5						
			(succes rate/SR) TBC	%	>90	-		90						
			Prosentase penyakit potensial KLB yang ditangani	%				100						
			Cakupan UCI Desa	%				99						

			Prosentase ODGJ berat yang tertangani	%					100							
	Program Kesehatan Masyarakat		Persentase ibu risiko tinggi kebidanan ditangani	%	98%	137.546.238.500		12.816.139.143	94							
			Persentase komplikasi kebidanan	%	98%				94							
			Persentase komplikasi pada neonatus	%	98%				94							
			Angka kesakitan bayi	%	65%				68							
			Persentase Balita Gizi Buruk	<0,4					<0,4							
			Persentase stunting	<23	<21				<23							
			Persentase Desa STBM	%	70				60							
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan	%					100							

			Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan	%				30						
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	realisasi pengadaan sarana prasarana pelayanan kesehatan					100	24.964.785.900		24.717.457.200		15.271.202.866	61,78
	Pembangunan puskesmas rawat inap	Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas Non rawat inap yang dibangun					1	11.155.627.000		11.155.627.000		6.381.753.189	57,21
			Jumlah puskesmas rawat inap yang dibangun					1						
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan/penyempurnaan gedung laboratorium kesehatan sesuai standar					1	2.965.000.000		-		-	#DIV/0!

			Pembangunan/penyempurnaan gedung Puskesmas Gondangrejo					1							
	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana RS	Pengembangan Rumah Sakit	Pembangunan Foodcourt RSUD Karanganyar					1	200.000.000		200.000.000				-
	operasional P4TO	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	P4TO Berfungsi standar					25	97.000.000		97.000.000		96.881.000		99,88
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Pembangunan Pagar RSUD					1	200.000.000		200.000.000		-		-
	sewa tanah puskesmas colomadu II	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya sewa tanah Puskesmas Colomadu II					12	40.000.000		2.695.600.000		2.318.960.000		86,03
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Ketersediaan data alat kesehatan yang sesuai dengan kondisi Fasilitas pelayanan kesehatan					12	1.253.672.200		1.253.652.200		1.169.974.400		93,33

			Pemenuhan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di Puskesmas					12						-	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksanannya Kalibrasi Alat Kesehatan					12	-	62.090.800		61.334.800			98,78
	Penyediaan alkes laboratorium		Tersedianya alat laboratorium kesehatan					1						-	
	Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Karanganyar	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	pengadaan alat kesehatan di RSUD Karanganyar (DAK)					1	3.709.000.000	3.709.000.000				-	-
		Pengadaan Obat, Vaksin	Ketersediaan Obat di Puskesmas					85	5.344.486.700	5.344.487.200		5.242.299.477			98,09
	Manajemen Pengelolaan obat dan perbekes		Persentase ketersediaan obat perbekalan kesehatan sesuai standar					80						-	

	Manajemen Pengelolaan obat dan perbekes	Persentase pelayanan farmasi di Fasyankes sesuai standar							14										-	
	Manajemen Pengelolaan obat dan perbekes	Persentase penggunaan obat rasional di Fasyankes sesuai standar							33										-	
	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengadaan obat	Persentase sarana produksi dan distribusi sarana farmasi sesuai standar							60										-	
	Manajemen Pengelolaan obat dan perbekes	Persentase distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke Puskesmas sesuai kebutuhan							93										-	
	Manajemen Pengelolaan obat dan perbekes	Persentase LPLPO Puskesmas yang dapat terlayani							93										-	
	Manajemen Pengelolaan obat dan perbekes	Persentase obat rusak/kadaluarsa dapat dimusnahkan							85										-	

		standar mutu gudang penyimpanan obat terpenuhi						76							-	
	Manajemen Pengelolaan obat dan perbekes	Prosesntase obat an perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan dapat terpenuhi						85							-	
	Manajemen Pengelolaan obat dan perbekes	Prossentase rencana kebutuhan obat tersusun tepat waktu						93							-	
	Manajemen Pengelolaan obat dan perbekes	Puskesmas memenuhi standar penulisan obat generik						82							-	
	Pengembangan Obat asli Indonesia	Tersedia bahan baku obat tradisional yang terstandar						30							-	

			Tersedianya obat, BMHP dan sarana prasarana penunjang pelayanan kefarmasian					12					-	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penderita penyakit yang mendapatkan akses penanganan sesuai standar					100	47.243.117.000		89.654.506.400		69.706.627.764	77,75
Kesehatan keluarga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (K4=95%)						75	168.250.000		298.625.000		296.739.800	99,37
JAMPERSAL;	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	persentase jaminan ibu hamil miskin tidak mampu yang belum memiliki jaminan						100	2.513.142.000		2.564.142.000		1.691.451.500	65,97

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar					90	25.000.000		25.000.000		24.025.000		96,10
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	persentase puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan balita sesuai standar					92	89.000.000		116.840.000		107.210.000		91,76
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan anak remaja					80	40.550.000		40.550.000		39.738.000		98,00
			Persentase Sekolah Dasar (SD-SMP sederajat) yang melaksanakan pelayanan penjangkaran sesuai standar						94						

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					94	41.300.000	41.300.000	39.871.000	96,54
	Kesehatan keluarga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan Usia Lanjut					75	45.900.000	45.900.000	44.764.000	97,53
	Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan penderita HT yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					85	85.000.000	85.000.000	84.472.000	99,38
	Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Prosentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					95	5.100.000	5.100.000	5.100.000	100,00

	Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	prosentase penderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					100	150.000.000		150.000.000		150.000.000		100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka keberhasilan Pengobatan (Sukses Rate)penderita TBC					90	77.312.000		77.312.000		75.361.700		97,48
			Cakupan pengobatan semua kasus TBC (CDR) TBC					39							
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart					94	51.495.000		51.495.000		41.207.500		80,02
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan desa/ kelurahan terjangkau KLB ditangani					100	150.400.000		1.240.327.000		1.097.771.700		88,51

	Perbaikan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Puskesmas cakupan remaja putri mendapat tablet tambah darah >80%						100	294.796.000		294.796.000		283.669.000		96,23
			Persentase Puskesmas capaian Kadarzi >85%						80							
			Persentase Puskesmas yang cakupan pemberian Vit A pada balita 100%						100							
			Persentase Puskesmas yang capaian ASI eksklusif minimal 65%						50							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase puskesmas yang memberikan pembinaan pada kelompok olahraga						50	50.000.000		50.000.000		48.543.000		97,09

			Persentase puskesmas yang mengembangkan Pos UKK					10						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar					50	123.000.000		368.605.000		332.762.575	90,28
			Pengelolaan limbah medis laboratorium sesuai standar					70						
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat					5	200.000.000		277.270.000		271.336.000	97,86
			Persentase puskesmas mengembangkan media promosi					10						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur,	Persentase penyehat tradisional sesuai standar					10	100.000.000		100.000.000		97.875.000	97,88

		Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase Peran serta UKBM dalam asuhan mandiri toga					20						
	Surveillance dan penanggulangan penyakit potensial KLB	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan AFP Rate					100	150.000.000		150.000.000		136.461.100	90,97
	Surveillance dan penanggulangan penyakit potensial KLB		Cakupan Discarded Campak					100						
	Surveillance dan penanggulangan penyakit potensial KLB		Cakupan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji					100						
	Surveillance dan penanggulangan penyakit potensial KLB		Prosentase Ketepatan SKDR Mingguan					99						
	Surveillance dan penanggulangan penyakit potensial KLB	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan kasus DBD yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE) dalam kurun waktu 1 tahun (100%)					100	176.693.000		761.538.000		755.696.100	99,23

	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular bersumber binatang	Cakupan zoonozis dan ditangani sesuai standar (100%)						100							
		Jumlah suspek malaria yang dilakukan pemeriksaan laboratorium						12							
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit Diare	Persentase Puskesmas dengan angka penemuan kasus diare >80%						67							
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA	Persentase Puskesmas dengan cakupan penemuan kasus pneumonia balita						67							
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung	Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B						100							

	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung		Persentase semua kasus baru Kusta yang menyelesaikan pengobatan sesuai standart						100						#DIV/0!
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kepesertaan yang dibayarkan Pemda						5750 0	24.917.500.000		26.880.729.400		24.886.293.010	92,58
			Masyarakat beresiko kesehatan tertangani 100 %						100						
	Operasional manajemen JKN		Prosentase Fasyankes yang melayani JKN						71						
	UKM Sekunder (BOK)	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase puskesmas yang aktif melakukan intervensi sesuai IKS						60	1.910.432.000		15.400.000		12.069.000	78,37
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Nilai IKS Puskesmas						0,4	13.745.256.000		13.745.256.000		8.129.311.100	59,14
	UKM Primer Puskesmas Jatipuro	BOK Pusk. Jatipuro	Nilai IKS Puskesmas Jatipuro						0,4	681.121.000		681.121.000		349.914.950	51,37

UKM Primer Puskesmas Jatiyoso	BOK Pusk. Jatiyoso	Nilai IKS Puskesmas Jatiyoso						0,4	692.287.000	692.287.000	434.744.000	62,80
UKM Primer Puskesmas Jumapolo	BOK Pusk. Jumapolo	Nilai IKS Puskesmas Jumapolo						0,4	614.125.000	614.125.000	409.779.100	66,73
UKM Primer Puskesmas Jumantono	BOK Pusk. Jumantono	Nilai IKS Puskesmas Jumantono						0,4	692.287.000	692.287.000	420.260.500	60,71
UKM Primer Puskesmas Matesih	BOK Pusk. Matesih	Nilai IKS Puskesmas Matesih						0,4	636.457.000	636.457.000	246.549.700	38,74
UKM Primer Puskesmas Tawangmangu	BOK Pusk. Tawangmangu	Nilai IKS Puskesmas Tawangmangu						0,4	781.614.000	781.614.000	494.529.000	63,27
UKM Primer Puskesmas Ngargoyoso	BOK Pusk. Ngargoyoso	Nilai IKS Puskesmas Ngargoyoso						0,4	736.951.000	736.951.000	467.673.000	63,46
UKM Primer Puskesmas Karangpandan	BOK Pusk. Karangpandan	Nilai IKS Puskesmas Karangpandan						0,4	658.789.000	658.789.000	418.027.850	63,45
UKM Primer Puskesmas Karanganyar	BOK Pusk. Karanganyar	Nilai IKS Puskesmas Karanganyar						0,4	669.955.000	669.955.000	470.514.000	70,23
UKM Primer Puskesmas Tasikmadu	BOK Pusk. Tasikmadu	Nilai IKS Puskesmas Tasikmadu						0,4	602.960.000	602.960.000	362.770.500	60,16

UKM Primer Puskesmas Jaten 1	BOK Pusk. Jaten I	Nilai IKS Puskesmas Jaten I					0,4	614.125.000	614.125.000	443.580.000	72,23
UKM Primer Puskesmas Jaten 2	BOK Pusk. Jaten II	Nilai IKS Puskesmas Jaten II					0,4	614.131.000	614.131.000	453.778.000	73,89
UKM Primer Puskesmas Colomadu 1	BOK Pusk. Colomadu I	Nilai IKS Puskesmas Colomadu I					0,4	647.623.000	647.623.000	310.362.000	47,92
UKM Primer Puskesmas Colomadu 2	BOK Pusk. Colomadu II	Nilai IKS Puskesmas Colomadu II					0,4	636.463.000	636.463.000	496.731.000	78,05
UKM Primer Puskesmas Gondangrejo	BOK Pusk. Gondangrejo	Nilai IKS Puskesmas Gondangrejo					0,4	725.785.000	725.785.000	363.749.400	50,12
UKM Primer Puskesmas Kebakkramat 1	BOK Pusk. Kebakkramat I	Nilai IKS Puskesmas Kebakkramat I					0,4	602.960.000	602.960.000	356.877.000	59,19
UKM Primer Puskesmas Kebakkramat 2	BOK Pusk. Kebakkramat II	Nilai IKS Puskesmas Kebakkramat II					0,4	602.960.000	602.960.000	294.338.100	48,82
UKM Primer Puskesmas Mojogedang 1	BOK Pusk. Mojogedang I	Nilai IKS Puskesmas Mojogedang I					0,4	625.291.000	625.291.000	467.048.000	74,69
UKM Primer Puskesmas Mojogedang 2	BOK Pusk. Mojogedang II	Nilai IKS Puskesmas Mojogedang II					0,4	602.960.000	602.960.000	373.310.000	61,91
UKM Primer Puskesmas Kerjo	BOK Pusk. Kerjo	Nilai IKS Puskesmas Kerjo					0,4	647.623.000	647.623.000	400.324.000	61,81

	UKM Primer Puskesmas Jenawi	BOK Pusk. Jenawi	Nilai IKS Puskesmas Jenawi					0,4	658.789.000	658.789.000	261.706.000	39,73
	Penanganan Kedaruratan Medis PSC 119	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	% kasus tertangani sesuai standar					91	500.000.000	20.530.605.000	12.733.521.120	62,02
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Puskesmas yang memenuhi syarat akreditasi					100	1.488.991.000	1.488.991.000	584.648.914	39,26
			Puskesmas dengan kinerja mutu minimal 8,5					90				
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer		Puskesmas dengan nilai IKM > 80					60				
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer		FKTP memenuhi syarat akreditasi					100				
	Upaya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan		RS yang memenuhi syarat akreditasi					80				
	Pelayanan imunisasi dasar dan lanjutan		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	UCI Desa					100	144.000.000	144.000.000	143.205.400
	Pelayanan imunisasi dasar dan lanjutan	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap						95				

		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								-	20.105.725.000	17.593.524.245	87,51
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terealisasinya sistem informasi kesehatan secara Terintegrasi					100	250.000.000		292.311.500	283.587.000	97,02
	Pengembangan SIK	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan SIK sesuai standar					28	250.000.000		292.311.500	283.587.000	97,02
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase fasyankes yang berizin					100	730.794.000		802.419.000	762.871.700	95,07
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah	persentase Klinik yang mendapatkan rekomendasi ijin operasional					100	15.000.000		15.000.000	11.160.000	74,40

		Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	persentase Rumah Sakit Kelas C dan D yang mendapatkan rekomendasi ijin operasional						100						
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	% Fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam memenuhi standar pelayanan						45	615.794.000		687.419.000		654.751.700	95,25
			Meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan sehingga bisa tercapai kualitas yang baik sesuai standar mutu yang ditetapkan						60						
			Puskesmas dengan kinerja pelayanan minimal 91							70					

			% puskesmas yang melakukan survey KM					100						
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	% rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan					100	100.000.000		100.000.000		96.960.000	96,96
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga medis sesuai kompetensi					30	4.008.050.300		3.608.823.900		3.365.983.500	93,27
			Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi					30					-	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	terpenuhinya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan					100	3.587.333.000		3.229.513.000		3.001.747.800	92,95
	Penunjang UPT	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Presentase Jasa tenaga honorer dan THL di Dinas dan UPT terbayarkan					100	3.139.440.000		2.781.620.000		2.605.430.000	93,67

			presentase terpenuhinya petugas keamanan kantor					100						
			presentase terpenuhinya petugas kebersihan					100						
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase jabatan fungsional kesehatan yang dilaksanakan penilaian angka kredit					100	447.893.000		447.893.000		396.317.800	88,48
			presentase Terpilihnya tenaga kesehatan teladan					100						
			Presentase Terselenggaranya pengembangan manajemen kepegawaian dengan baik					100						

		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM tenaga kesehatan yang memenuhi Kompetensinya						100	420.717.300		379.310.900		364.235.700		96,03
	Pembinaan, pengawasan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase perizinan tenaga kesehatan						93	420.717.300		379.310.900		364.235.700		96,03
			persentase perizinan tenaga medis						97							
			persentase tenaga kesehatan sesuai standar rasio						22							
			persentase tenaga medis sesuai standar rasio						50							
			terlaksananya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan						12							

			terlaksananya uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan						1						
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian						30	449.125.800		464.342.400		429.700.600	92,54
			Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan						100					-	
			Persentase TPM yang memenuhi syarat						30					-	
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasyankes penunjang yang berizin						100	66.045.700		80.722.000		73.869.500	91,51

	Pengawasan obat dan makanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persertanse sarana toko alkes dan optik yang memenuhi ketentuan					80	42.203.000		42.203.000		38.880.600		92,13
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					100	-		14.676.300		14.676.300		
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, UMOT dsb yang memperoleh Rekomendasi Perizinan					100	23.842.700		23.842.700		20.312.600		85,19

		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Prosentase PIRT yang berijin					40	97.745.000		112.666.600		112.596.600		99,94
	Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan tempat pengelolaan makanan dan minuman (TPM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang dilakukan IS					40	97.745.000		112.666.600		112.596.600		99,94
			Persentase PIRT yang mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan					40							

		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM mengikuti sertifikasi laik higiene sanitasi					100	85.000.000		85.000.000		75.940.000		89,34
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					100	85.000.000		85.000.000		75.940.000		89,34
	Pengawasan makanan minuman		Persentase TPM yang dibina					40							
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase TPM yang dibina					100	25.000.000		25.000.000		25.000.000		100,00

		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase sentra makanan jajanan yang dibina					40	25.000.000		25.000.000		25.000.000		100,00
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT berijin yang sudah dievaluasi					100	175.335.100		160.953.800		142.294.500		88,41
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase PIRT yang dilakukan IS					40	81.097.000		87.165.000		77.145.000		88,50
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	persentase Industri Rumah Tangga yang memperoleh Rekomendasi Perizinan					100	94.238.100		73.788.800		65.149.500		88,29
	Program Kesehatan Masyarakat		Nilai IKS Kabupaten		0,8	137.546.238.500	12.816.139.143								

			Persentase ibu risiko tinggi kebidanan ditangani		98%														
			Persentase komplikasi kebidanan		98%														
			Persentase komplikasi pada neonatus		98%														
			Angka kesakitan bayi		65%														
			Angka kesakitan lansia		46%														
			Angka kesakitan anak balita		46%														
			Persentase kadarzi		85														
			Persentase stunting		<21														
			Persentase Desa STBM		70														
			Persentase Rumah Tangga Sehat		90														
			Jumlah desa siaga aktif mandiri		30 desa														

	Program Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa siaga Aktif					100	200.452.000		544.799.200		536.783.600		98,53
			Persentase rumah tangga sehat					90					-		
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor					100	155.452.000		499.799.200		495.960.600		99,23
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa siaga aktif mandiri					21	155.452.000		499.799.200		495.960.600		99,23
			Persentase rumah tangga yang didata PHBS					65							
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gerakan preventif dan promotif bidang kesehatan					100	25.000.000		25.000.000		23.182.000		92,73

		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan pembinaan gerakan hidup bersih dan sehat					4	25.000.000		25.000.000		23.182.000		92,73
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang aktif					100	20.000.000		20.000.000		17.641.000		88,21
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM yang dilakukan pembinaan					5	20.000.000		20.000.000		17.641.000		88,21
	Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang kesehatan	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu mandiri					15							

II.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi terkait tugas dan Fungsi Pelayanan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diantaranya adalah:

A. Bidang Pelayanan Kesehatan

1. Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan secara kualitas dan kuantitas yang berakibat pada kinerja pelayanan yang tidak optimal.
2. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan belum merata sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat terutama untuk fasilitas pelayanan kesehatan swasta.
3. Manajemen pelayanan evakuasi pasien gawat darurat belum terlaksana sesuai kebutuhan dan standar.
4. Pencacatan dan pelaporan kinerja pelayanan belum tertib
5. Sebagian besar penyehatan tradisional belum patuh terhadap ketentuan peraturan yang berlaku
6. Presentase pemanfaatan tanaman obat keluarga dimasyarakat masih rendah

B. Bidang Kesehatan Masyarakat

1. Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan terutama tenaga pelayanan program prioritas meliputi tenaga gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan.
2. Sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan belum tercukupi sesuai kebutuhan dan standar ideal.
3. Kualitas data yang terverifikasi belum bisa memenuhi kebutuhan pelayanan dan penetapan kebijakan.
4. Peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam mendukung program prioritas secara kualitas dan kuantitas belum terpenuhi tercemin pada ketersediaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat.

C. Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit

1. Penyelenggaraan surveilans penyakit menular dan tidak menular belum sesuai dengan ketentuan.
2. Kajian hasil surveilans belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berdampak pada kualitas sinkronisasi/ harmonisasi tata laksana pengendalian penyakit kurang.
3. Pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian penyakit belum sesuai dengan kebutuhan dan kajian epidemiologi.
4. Sumber daya penyelenggaraan pengendalian penyakit belum sesuai kebutuhan.

D. Bidang Sumber Daya Kesehatan

1. Sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan terutama yang dikelola oleh swasta masih terbatas.
2. Sumber daya manusia kesehatan secara kuantitas dan kualitas masih terbatas.

3. Pengaturan alat dan perbekalan kesehatan untuk setiap fasilitas pelayanan kesehatan belum terkelola dengan baik.
4. Pengaturan obat dan bahan medis habis pakai untuk setiap fasilitas pelayanan kesehatan belum terkelola dengan baik.

E. Sekretariat

1. Regulasi yang tersedia belum bisa menjawab semua kebutuhan penyelenggaraan kebutuhan kesehatan
2. Struktur kelembagaan dinas kesehatan belum mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan kebutuhan urusan kesehatan
3. Formasi jabatan belum bisa mengakomodir kebutuhan urusan kesehatan yang meliputi formasi struktural dan fungsional.
4. Kompetensi pejabat baik structural maupun fungsional belum semuanya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan tugas dan fungsi.
5. Sumber daya penyelenggaraan urusan kesehatan belum dapat terakomodasi dalam pola kebijakan daerah meliputi sumber daya manusia, anggaran pembiayaan kesehatan, bahan bahan yang diperlukan untuk pelayanan, peralatan kesehatan dan prosedur pelayanan.

II.2 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. **Pelayanan Kesehatan Ibu**
 - a. **PelayananAntenatal (K1 dan K4)**

Kehamilan adalah anugerah yang didambakan oleh pasangan suami istri dengan harapan mendapatkan keturunan yang sehat dan cerdas. Setiap ibu hamil diwajibkan dapat menjalankan kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat serta melahirkan bayi yang sehat. Oleh karena itu, setiap ibu hamil harus dapat dengan mudah mengakses fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar, termasuk kemungkinan adanya masalah/penyakit yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan janinnya.

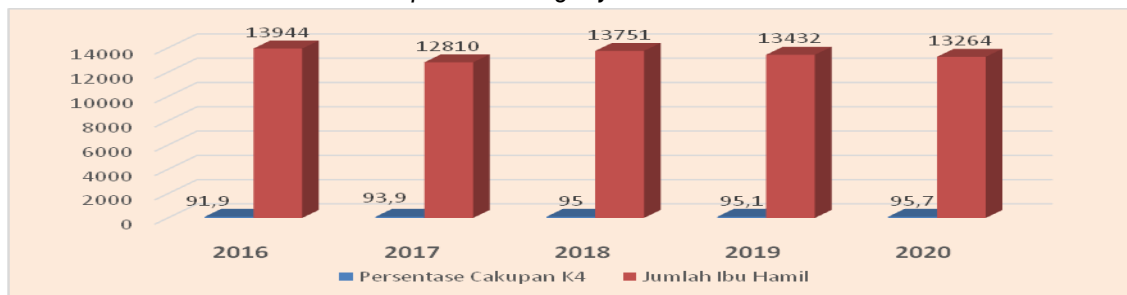
Pelayanan antenatal merupakan pelayanan/pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil sesuai standar pada masa kehamilan oleh tenaga terampil (dokter, bidan atau perawat) 4 kali dengan interval 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga, akan menggambarkan cakupan pelayanan antenatal ibu hamil yang dapat dipantau melalui pelayanan kunjungan ibu hamil K1 dan K4. Penimbangan berat badan, pemeriksaan kehamilan, pemberian tablet Fe, pemberian imunisasi TT, dan konsultasi merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada ibu hamil yang berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan (Antenatal Care/ANC).

Dalam pelayanan ibu hamil (antenatal) baik pada K1 maupun K4 ibu hamil dibekali dengan tablet besi (Fe),hal ini merupakan upaya penanggulangan anemi pada ibu hamil. Anemi adalah penyebab utama kematian ibu maternal yang disebabkan perdarahan pada waktu

persalinan. Selama hamil, disarankan ibu hamil mengonsumsi 90 tablet Fe mulai trimester I sampai trimester III. Demikian pula pemberian imunisasi TT (Tetanus Toxoid) yang dapat mencegah infeksi pada janin yang dikandung oleh ibu hamil. Imunisasi TT diberikan 2 kali selama kehamilan.

Cakupan K4 di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebanyak 95,7% dari 13.264 ibu hamil, sedangkan tahun 2019 sebanyak 95,1% dari 13.432 ibu hamil, tahun 2018 sebanyak 95,0% dari 13.751 ibu hamil, tahun 2017 sebanyak 93,9% dari 12.810 ibu hamil, dan tahun 2016 sebanyak 91,9% dari 13.944 ibu hamil. Dibawah ini grafik yang menunjukkan cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Karanganyar tahun 2016– 2020.

Grafik4.1 : Perkembangan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Karanganyar Tahun 2016– 2020

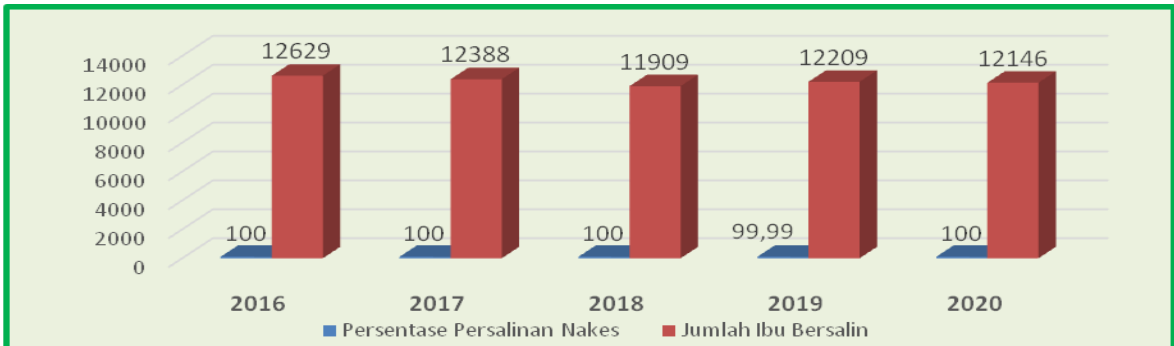


b. **Persalinan Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan**

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Pada kenyataan di lapangan, masih terdapat penolong persalinan yang bukan tenaga kesehatan dan diluar fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu secara bertahap seluruh persalinan akan ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten dan diarahkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang kompeten memberikan pelayanan persalinan adalah dokter spesialis kebidanan, dokter dan bidan.

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan professional tahun 2020 sebanyak 100% (dari 12.146 jumlah ibu bersalin), sedang tahun 2019 sebanyak 99,99% (dari 12.209 jumlah ibu hamil), tahun 2018 sebanyak 100% (dari 11.909 jumlah ibu bersalin), tahun 2017 sebanyak 100% (dari 12.388 jumlah ibu bersalin), dan tahun 2016 sebanyak 100% (dari 12.629 jumlah ibu bersalin).

Grafik 4.2 : Perkembangan Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 - 2020



c. Pelayanan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari paska persalinan oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal 3 kali dengan ketentuan waktu:

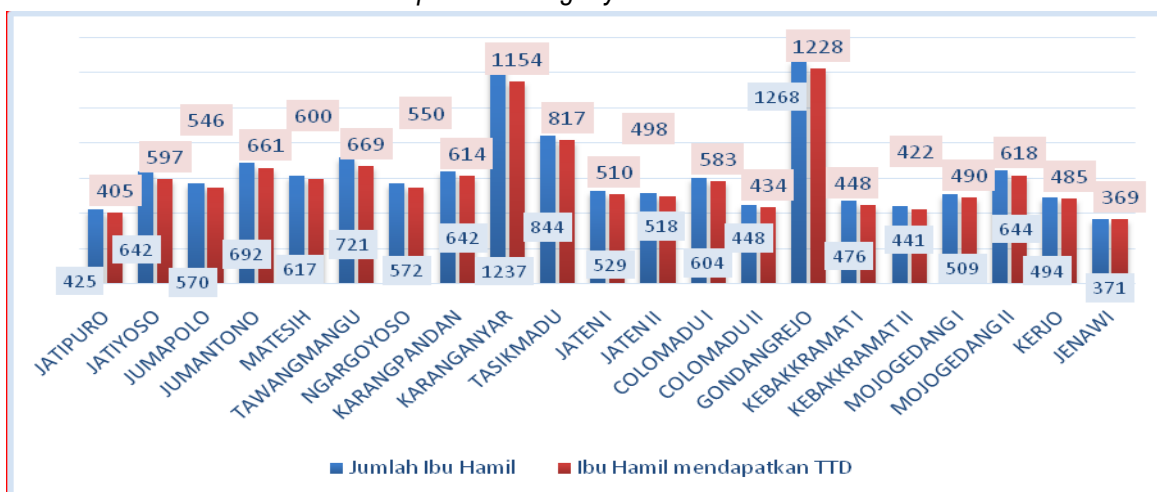
1. Kunjungan nifas pertama pada masa 6 jam sampai dengan 3 hari selah persalinan.
2. Kunjungan nifas ke dua dalam waktu 2 minggu setelah persalinan (8-14 hari).
3. Kunjungan nifas ke tiga dalam waktu 6 minggu setelah persalinan (36-42 hari).

Cakupan pelayanan pada ibu nifas tahun 2020 sebesar 12.086 atau 99,5%, sedang tahun 2019 sebesar 12.205 atau 100% dari ibu bersalin, tahun 2018 sebesar 11.904 atau 100% dari ibu bersalin, tahun 2017 sebesar 12.388 atau 100% dari jumlah ibu bersalin, dan tahun 2016 yaitu 12.612 atau 99,4% dari jumlah ibu bersalin.

d. Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

Zat besi merupakan salah satu zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Bahkan sebelum hamil, wanita direkomendasikan untuk mencukupi kebutuhan zat besinya. Untuk mencegah anemia saat hamil, Anda dapat mengonsumsi tablet besi atau tablet tambah darah. Walaupun ada banyak cara untuk mendapatkan zat besi dari makanan, tetapi ada baiknya Anda juga mengonsumsi tambahan zat besi yang bisa Anda dapatkan dari tablet tambah darah. Di Indonesia, pemerintah merekomendasikan konsumsi tablet tambah darah (TTD)/ tablet besi untuk ibu hamil sebanyak 90 tablet atau lebih selama kehamilan guna mencegah anemia defisiensi besi saat hamil, ibu hamil pada tahun 2020 Kabupaten Karanganyar yang mendapatkan tablet tambah darah (90 tablet) sebanyak 12.698 dari 13.264 ibu hamil (95,7%). Berikut grafik perkembangan ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (TTD 90 tablet) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

Grafik4.3 : Ibu Hamil yang mendapat TTD 90 tablet di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020



2. Pelayanan Kesehatan Neonatus dan Bayi

a. Kunjungan Neonatus (KN1 dan KN2)

Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan yang paling tinggi. Upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut antara lain dengan melakukan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan pada neonatus (0-28 hari) minimal 3 (kali) kali, satu kali pada umur 0-7 hari (KN1) dan dua kali lagi pada umur 8-28 hari (KN3 / KN Lengkap).

Pelayanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan neonatal dasar (tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, kulit, dan pemberian imunisasi), pemberian vitamin K, Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), dan penyuluhan perawatan neonatus di rumah menggunakan Buku KIA.

Kunjungan neonates (KN1) tahun 2020 sebanyak 12.139 bayi (100%) dari jumlah bayi lahir hidup, sedang tahun 2019 sebanyak 12.195 bayi (100%) dari jumlah bayi lahir hidup, tahun 2018 sebanyak 11.873 bayi (99,8%) dari bayi lahir hidup, tahun 2017 sebanyak 12.407 bayi (100%) dari bayi lahir hidup, dan tahun 2016 sebanyak 12.513 bayi (99,9%) dari 12.651 bayi lahir hidup. Sedangkan KN3 tahun 2020 sebanyak 12.051 (99,3%), tahun 2019 sebanyak 12.102 (99,2%) dari bayi lahir hidup, tahun 2018 sebanyak 11.815 (99,3%) dari bayi lahir hidup, tahun 2017 sebanyak 12.250 (98,8%), dan tahun 2016 sebanyak 12.513 bayi (98,9%) dari bayi lahir hidup. Cakupan kunjungan neonatus di Kabupaten Karanganyar tinggi, hal ini menggambarkan kondisi saat ini berupa meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan neonatus, peningkatan pelayanan kesehatan terutama kesehatan anak (neonatus, bayi, balita) di Puskesmas, dan adanya pemeriksaan kunjungan ke rumah oleh tenaga kesehatan bagi neonatus yang tidak dapat berkunjung ke puskesmas serta sistem pencatatan dan pelaporan (PWS KIA) yang sudah berjalan dengan baik.

b. Pelayanan Kesehatan Bayi

Bayi juga merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan maupun serangan penyakit, Kesehatan bayi dan balita harus dipantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Pelayanan kesehatan bayi termasuk salah satu dari beberapa indikator yang bias menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan pada bayi ditujukan pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) minimal 4 kali, yaitu pada 29 hari-2bulan, 3-5 bulan, 6-8 bulan dan 9-12 bulan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Pelayanan ini terdiri dari penimbangan berat badan, pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), Stimulus Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi, pemberian vitamin A pada bayi, dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASI Eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) dan lain-lain.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 sebesar 99,3% (12.051 bayi) dari 12.139 jumlah bayi, sedang tahun2019 sebesar 96,4% (11.755 bayi) dari 12.198 jumlah bayi, tahun 2018 sebesar 99,1% (11.799 bayi) dari 11.901 jumlah bayi, tahun 2017 sebesar 98,1% (12.171 bayi) dari 12.404 jumlah bayi, dan tahun 2016 sebesar 95,2 % (12.049 bayi)dari 12.651 jumlah bayi. Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebanyak 7.146 bayi (69%).

3. Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah

a. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita dan Prasekolah

Deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah yang dimaksudkan adalah anak umur 1 - 6 tahun yang dideteksi dini pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan dan dideteksi sesuai jadwalnya. Upaya pemantauan perkembangan kesehatan anak diarahkan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak dengan perhatian khusus pada kelompok balita yang merupakan masa krisis atau periode emas tumbuh kembang anak.

Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 sebesar 44.036 (91,11%) dan pra sekolah sebesar 17.233 (77,55%). Target cakupan deteksi dini tumbuh kembang pra sekolah tahun 2020 yaitu 90% dan belum memenuhi target dikarenakan terdapat PAUD tidak menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar akibat Pandemi Covid-19 dan Orang tua tidak mengizinkan anaknya datang ke PAUD untuk di lakukan SDIDTK.

Upaya peningkatan ketrampilan petugas kesehatan dalam upaya Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak (SDIDTK) telah dilakukan dengan pelatihan standarisasi SDIDTK di semua kabupaten/kota baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten. Untuk pengembangan program SDIDTK maka ketrampilan bisa diperoleh tidak hanya melalui pelatihan formal tetapi juga bisa on the job training baik di puskesmas maupun di Rumah Sakit.

Kementerian yang bertanggung jawab langsung terhadap program pengembangan anak usia dini yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Departemen Agama, Kementerian Sosial dan BKKBN telah mendukung pengembangan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan pra sekolah melalui integrasi kegiatan posyandu, PAUD dan BKB. Diharapkan melalui integrasi tersebut, semua balita dan anak pra sekolah akan mendapatkan stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang yang akan mamacu pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal sesuai tahap perkembangannya.

Untuk implementasi pelaksanaan SDIDTK di lapangan maka Pemerintah bersama semua unsur terkait baik swasta, organisasi profesi, LSM dan masyarakat perlu mendukung baik sarana prasarana, pendanaan dan sumber daya manusianya.

b. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, pemeriksaan ketajaman mata, ketajaman pendengaran, kesehatan gigi, kelainan mental emosional dan kebugaran jasmani. Pelaksanaan penjaringan kesehatan ini dikoordinir oleh puskesmas bersama dengan guru sekolah dan kader kesehatan/konselor kesehatan. Setiap puskesmas mempunyai tugas melakukan penjaringan kesehatan siswa SD/MI di wilayah kerjanya dan dilakukan satu kali pada setiap awal tahun ajaran baru sekolah.

Untuk siswa SD dan setingkat ditargetkan 100 % mendapatkan pemantauan kesehatan melalui penjaringan kesehatan. Dengan melakukan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat diharapkan dapat menapis/menjaring anak yang sakit dan melakukan tindakan intervensi secara dini sehingga anak yang sakit menjadi sembuh dan anak yang sehat tidak tertular menjadi sakit.

Jumlah murid kelas 1 SD tahun 2020 sebanyak 11.560 siswa. Jumlah penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan/guru UKS/kader kesehatan sekolah pada tahun 2020 sebesar 11.066 siswa, sedang tahun 2019 sebesar 12.895 siswa, tahun 2018 sebanyak 13.555 siswa, tahun 2017 sebesar 13.681 siswa, dan tahun 2016 sebesar 13.512. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat yang sudah mencapai 100 % yaitu Puskesmas Jatipuro, Jumapolo, Matesih, Tasikmadu, Jaten II, dan Colomadu II. Sedangkan cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat yang belum mencapai

100% yaitu Puskesmas Jatiyoso (87,8%), Jumantho (94,6%), Tawangmangu (98,4%), Ngarogoyoso (90,7%), Karangpandan (87,5%), Karanganyar (99,4%),Jaten I (91,6%), Colomadu I (99,4%), Gondangrejo (91,5%), Kebakkramat I (95,5%), Kebakkramat II (99,7%), Mojogedang I (94,6%), Mojogedang II (86,8%), Kerjo (98,8%) dan Jenawi (96,5%).

c. Pelayanan Kesehatan Remaja

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dan terjadi perubahan fisik yang cepat menyamai orang dewasa, tetapiemosinya belum dapat mengikuti perkembangan jasmaninya, hal ini sering menimbulkan gejala sehingga masa ini perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah pendidikan dan perhatian agar anak berperilaku hidup sehat, baik secara fisik maupun mental.

Pemeriksaan kesehatan remaja adalah pemeriksaan kesehatan siswa kelas 1 SLTP dan setingkat, kelas 1 SMU dan setingkat melalui penjangkauan kesehatan terhadap murid kelas 1 SLTP dan Madrasah Tsanawiyah, kelas 1 SMU/SMK dan Madrasah Aliyah yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama dengan guru UKS terlatih dan kader kesehatan remaja secara berjenjang.

Pada tahun 2020 jumlah siswa kelas 7 SMP/MTS Kabupaten Karanganyar sebanyak 9.603siswa dan yang mendapat pelayanan kesehatan sebesar 8.135 siswa (84,7%), sedang jumlah siswa kelas 10 SMA/MA sebanyak 5.365siswa dan yang mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 3.869 siswa (72,1%).

4. Pelayanan Imunisasi

a. Persentase Desa yang Mencapai “Universal Child Immunization” (UCI)

Strategi operasional pencapaian cakupan tinggi dan merata berupa pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) yang berdasarkan indikator cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) yang meliputi HB0 1 kali, BCG 1kali, DPT-HB-Hib 3 kali, Polio 4 kali, dan Campak/MR 1 kali pada bayi usia 1 tahun dengan cakupan minimal 80 persen dari jumlah sasaran bayi di desa.

Persentase Desa / Kelurahan UCI tahun 2020 Kabupaten Karanganyar sebesar 98,9% (175 Desa dari 177 Desa), sedang tahun 2019 sebesar 99,4% (176 desa dari 177 desa), tahun 2018 sebesar 98,3% (174 desa dari 177 desa), tahun 2017 sebesar 98,3% (174 desa dari 177 desa), dan tahun 2016 sebesar 98,9% (175 desa dari 177 desa). Pada tahun 2019 dan tahun 2018 naiknya cakupan UCI desa secara *significant* dikarenakan perubahan indikator yang digunakan. Pada tahun 2012, dikategorikan sebagai desa UCI jika cakupan seluruh imunisasi dasar minimal 80%, tetapi tahun 2014 menggunakan angka minimal 80% untuk seluruh cakupan bayi riil yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (sesuai standar cakupan nasional). Kelurahan UCI sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 belum bisa mencapai

100% sesuai standart Propinsi Jawa Tengah karena masih adanya penolakan terhadap imunisasi di masyarakat oleh kelompok tertentu tertentu karena paham agama/ keyakinan. Berikut perkembangan cakupan Desa UCI di Kabupaten Karanganyar Tahun 2016–2020 :

Grafik4.6 : Perkembangan Cakupan Desa UCI di Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 – 2020



Cakupan desa UCI pada tahun 2020 yang tidak mencapai 100% adalah di wilayah kerja Puskesmas Tawangmangu (90%) dan Puskesmas Jatiyoso (88,9%), dikarenakan di wilayah Kecamatan Tawangmangu dan Jatiyosoterdapat penolakan terhadap imunisasi di masyarakat oleh kelompok tertentu karena paham agama/ keyakinan.

b. Cakupan Imunisasi bayi

Upaya untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian bayi serta anak balita dilaksanakan program imunisasi baik program rutin maupun program tambahan/suplemen untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti TBC, *Difteri*, *Pertusis*, *Tetanus*, *Polio*, *Hepatitis B*, dan MR. Bayi seharusnya mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG 1 kali, DPT-Hib 3 kali, Polio 4 kali, HB Uniject 1 kali dan campak 1 kali.

Selain pemberian imunisasi rutin, program imunisasi juga melaksanakan program imunisasi tambahan/suplemen yaitu Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) DT, BIAS Campak/MR yang diberikan pada semua usia kelas I SD/MI/SDLB/SLB, sedangkan BIAS Td diberikan pada semua anak usia kelas II dan V SD/MI/SDLB/SLB, *Backlog Fighting* (melengkapi status imunisasi).

Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi di Kabupaten Karanganyar dari semua antigen sudah mencapai target minimal nasional 96,5%. Jumlah sasaran bayi pada tahun 2020 adalah 12.037 bayi. Sedang cakupan masing-masing jenis imunisasi adalah sebagai berikut: BCG (11.752/ 96,8%), DPT+HB 3 (11.736/97,5%), Polio 4 (11.750/97,6%), Campak (11.684/97,1%), dan Imunisasi Dasar Lengkap (11.617/96,5%).

c. **Drop Out Imunisasi DPT, HB, Hib 1, Campak/MR**

Untuk menilai angka drop out cakupan imunisasi DPT-HB-Hib 1-MR, dilihat dari cakupan imunisasi DPT-HB-Hib 1 dikurangi cakupan imunisasi MR dibagi cakupan imunisasi MR dikalikan 100%. Angka drop out dikategorikan bagus jika diantara +5 sd -5.angka Drop out DPT-HB-Hib 1-MR kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebesar +9, yang berarti bahwa masih banyak bayi yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib 1, namun bayi-bayi tersebut tidak lengkap mendapatkan imunisasi dasar sampai dengan imunisasi MR.

d. **WUS Mendapat Imunisasi TT**

Imunisasi TT Wanita usia Subur adalah pemberian imunisasi TT pada Wanita Usia Subur (15-39 tahun) sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu yang berguna bagi kekebalan seumur hidup. Data kegiatan imunisasi TT WUS saat ini akurasiya masih sangat kurang sehingga belum dapat dinalisis. Hal ini disebabkan :

- Pencatatan dan pelaporan status imunisasi 5 dosis belum berjalan dengan baik karena pelaksanaan skrining status belum optimal.
- Penggunaan format pelaporan yang berbeda antara kabupaten/kota ke provinsi dan puskesmas ke kabupaten/kota terutama untuk ibu hamil dan non ibu hamil.

5. **Pelayanan Kesehatan Gigi**

a. **Rasio Tambal Cabut Gigi Tetap**

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas meliputi kegiatan pelayanan dasar gigi dan upaya kesehatan gigi sekolah. Kegiatan pelayanan dasar gigi adalah tumpatan (penambalan) gigi tetap dan pencabutan gigi tetap. Indikasi dari perhatian masyarakat adalah bila tumpatan gigi tetap semakin bertambah banyak berarti masyarakat lebih memperhatikan kesehatan gigi yang merupakan tindakan preventif sebelum gigi tetap betul betul rusak dan harus dicabut. Sedang pencabutan gigi tetap adalah tindakan kuratif dan rehabilitatif yang merupakan tindakan terakhir yang harus diambil oleh seorang pasien.

Jumlah tumpatan gigi tetap di tahun 2020 sebesar 2.436, turun dibanding tahun 2019 sebesar 4.565, sedang tahun 2018 sebesar 3.909, tahun 2017 sebesar 4.032,dan tahun 2016 sebesar 5.268. Sementara jumlah pencabutan gigi tetap juga mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 2.032, sedang pada tahun 2019 sebesar 3.062, tahun 2018 sebesar 7.787, dan tahun 2017 sebesar 3.413.

b. **Murid SD/MI Mendapat Pemeriksaan Gigi dan Mulut**

Kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut lainnya adalah Upaya Kesehatan Gigi Sekolah yang merupakan upaya promotif dan preventif kesehatan gigi khususnya untuk anak sekolah. Kegiatan UKGS meliputi pemeriksaan gigi pada seluruh murid untuk mendapatkan murid yang perlu perawatan gigi, kemudian melakukan perawatan pada murid yang memerlukan.

Pada tahun 2020 jumlah murid SD/MI sebanyak 78.262 siswa, sedang yang mendapatkan Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) sebanyak 14.199 siswa, yang perlu perawatan sebanyak 4.029 siswa, dan yang mendapatkan perawatan sebanyak 2.506 siswa.

6. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut yang dimaksudkan adalah penduduk usia 45 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan, baik di Puskesmas maupun di Posyandu/Kelompok Usia Lanjut . Yang termasuk dalam kelompok pra usia lanjut adalah kelompok umur 45 - 59 tahun, sedangkan usia lanjut adalah kelompok umur lebih atau sama dengan 60 tahun.

Jumlah usia lanjut tingkat Kabupaten Karanganyarpada tahun 2020 sebesar 119.984 dan yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 86.612 atau 72,2%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pra usila dan usila adalah sebagai berikut :

- Pertemuan Koordinasi Program Kesehatan Usila Kabupaten Karanganyar, dengan kesepakatan identifikasi kelompok pra usila di masing-masing puskesmas dan memberikan dukungan kegiatan dan pelayanan kesehatan.
- Advokasi ke SKPD provinsi dengan pengembangan model kelompok pra usila percontohan dan fasilitasi pelayanan kesehatan.

7. Pelayanan Kesehatan Kerja

Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dan merata untuk seluruh masyarakat merupakan keinginan yang menjadi landasan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Indonesia.

Pembangunan kesehatan di Indonesia selama beberapa dekade yang lalu harus diakui relatif berhasil, terutama pembangunan infra struktur pelayanan kesehatan yang telah menyentuh sebagian besar wilayah kecamatan dan pedesaan.

Namun keberhasilan yang sudah dicapai belum dapat menuntaskan problem kesehatan masyarakat secara menyeluruh, bahkan sebaliknya tantangan sektor baik formal maupun informal kesehatan cenderung semakin meningkat. Tantangan lainnya yang harus ditanggulangi antara lain adalah meningkatnya masalah kesehatan kerja, serta dampak globalisasi yang akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan keadaan kesehatan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas sangat diperlukan upaya agar masalah kesehatan di masa depan dapat ditanggulangi sehingga mencapai kualitas kesehatan masyarakat senantiasa terjaga baik.

Beberapa upaya pelayanan kesehatan kerja yang dilakukan di Kabupaten Karanganyar adalah pembinaan upaya pengembangan pelayanan kesehatan kerja pada puskesmas di kawasan/sentra industri. Peningkatan kapasitas dokter puskesmas dan dokter klinik perusahaan tentang pelayanan kesehatan kerja dan deteksi dini penyakit akibat kerja, serta peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas program dalam pengembangan pelayanan kesehatan kerja baik di Puskesmas maupun di masyarakat

Berdasarkan data dari Disdukcapil Kabupaten Karanganyar, jumlah Penduduk di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 adalah 934.303 jiwa dan 68,9% penduduknya merupakan usia kerja.

Pekerja sektor informal adalah mereka yang bekerja dengan modal skala kecil dengan ciri-ciri antara lain : bekerja dalam jam kerja yang tidak tetap dan umumnya mempergunakan tenaga kerja dari lingkungan keluarga sendiri, risiko bahaya pekerjaan tinggi, keterbatasan sumber daya dalam mengubah lingkungan kerja, kesadaran tentang risiko bahaya pekerjaan rendah, kondisi pekerjaan tidak ergonomis, keluarga banyak yang terpajan, kurangnya pemeliharaan kesehatan M. Mikhew (ICHOIS 1997).

Sedang pekerja sektor formal adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan, instansi instansi pemerintah dimana dalam menjalankan pekerjaannya pekerja tersebut mendapat perlindungan dari undang-undang yang ada, baik untuk kesejahteraannya maupun untuk kesehatannya. Namun begitu untuk lebih melindungi pekerja pada sektor formal ini kegiatan pencegahan penyakit akibat kerja perlu lebih dilaksanakan.

Pekerja sektor formal maupun informal memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu sudah sepatutnya para pekerja ini mendapatkan perhatian dari pemerintah. Salah satunya adalah dalam bidang peningkatan derajat kesehatan.

8. Upaya Penyuluhan Kesehatan

Kesehatan sebagai hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab setiap orang, keluarga dan masyarakat serta didukung oleh pemerintah. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pembangunan Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk itu upaya kesehatan harus ditingkatkan secara terus menerus untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, lingkungan yang sehat dan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Setiap orang

juga berkewajiban berperilaku Hidup Bersih dan Sehat serta menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Promosi kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Kegiatan promosi kesehatan yang diselenggarakan di Pusat dan Daerah mencakup diantaranya penyebarluasan informasi termasuk penyuluhan kesehatan.

Upaya penyuluhan adalah semua usaha secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia sesuai prinsip-prinsip pendidikan dalam bidang kesehatan. Penyuluhan kelompok adalah penyuluhan yang dilakukan pada kelompok sasaran tertentu, misalnya : kelompok siswa sekolah, kelompok ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Sedangkan penyuluhan massa adalah penyuluhan yang dilakukan dengan sasaran massa seperti : pameran, pemutaran film, melalui media massa, cetak dan elektronik.

A. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

1. Komplikasi kebidanan yang ditangani

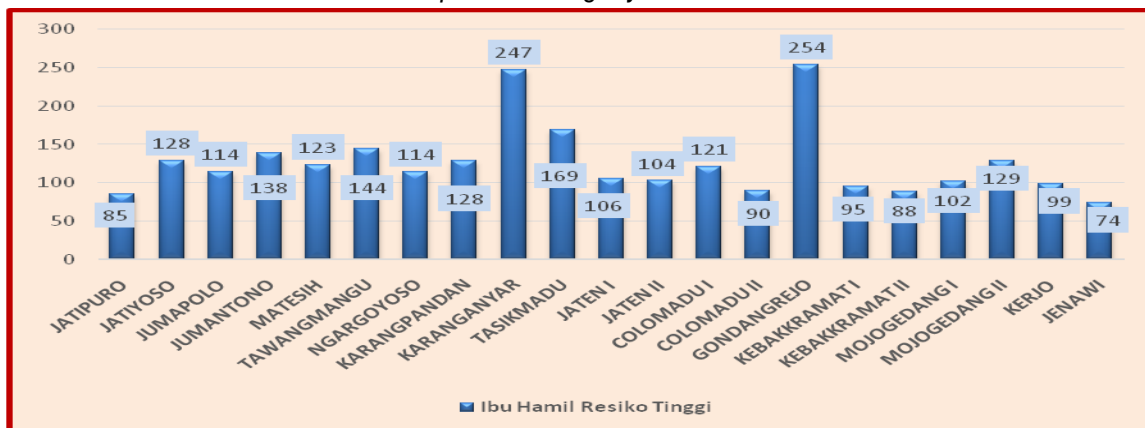
Penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapatkan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Diperkirakan 15-20 persen ibu hamil akan mengalami komplikasi kebidanan. Komplikasi dalam kehamilan dan persalinan tidak selalu dapat diduga sebelumnya, oleh karenanya semua persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan agar komplikasi kebidanan dapat segera dideteksi dan ditangani.

Ibu hamil dengan resiko tinggi adalah keadaan ibu hamil yang mengancam kehidupannya maupun janinnya, misalnya umur, paritas, interval, dan tinggi badan. Sedang komplikasi pada proses persalinan adalah keadaan dalam proses persalinan yang mengancam kehidupan ibu maupun janinnya, misalnya pendarahan, preeklamsia, infeksi jalan lahir, letak lintang, partus lama, dan lain-lain. Ibu hamil resiko tinggi dan komplikasi ditangani adalah ibu hamil dengan resiko tinggi dan komplikasi yang ditemukan untuk mendapat pertolongan pertama dan rujukan oleh tenaga kesehatan.

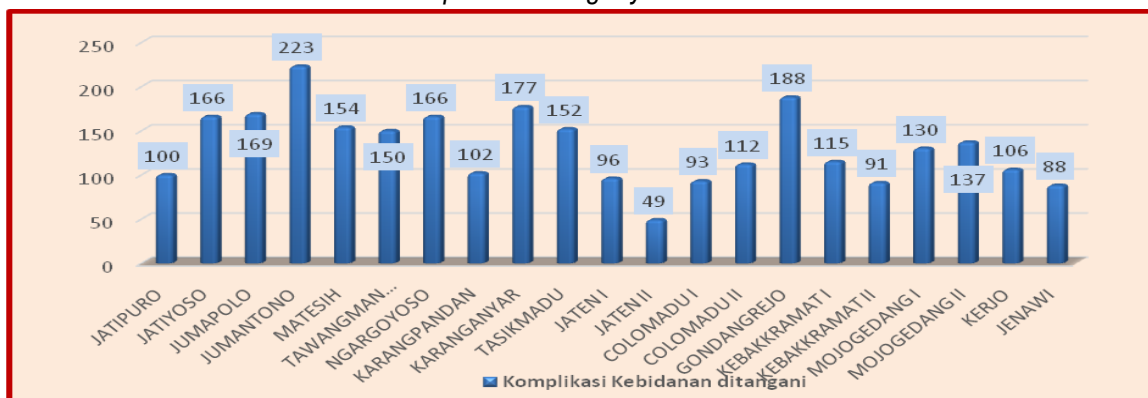
Cakupan ibu hamil resiko tinggi tahun 2020 sebesar 2.653 dari total 13.364 ibu hamil dan Penanganan ibu hamil resiko tinggi sebesar 2764 (104,2%). Cakupan penanganan ibu hamil resiko tinggi dan komplikasi tertinggi di wilayah Puskesmas Jumantono sebesar 223 kasus dari ibu hamil resiko tinggi yang diperkirakan. Sedangkan penanganan kasus terendah di wilayah puskesmas Jaten Ilyaitu sebesar 49 kasus.

Berikut ini grafik cakupan ibu hamil resiko tinggi dan komplikasi ditangani di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

Grafik4.7 : Cakupan Ibu Hamil Resiko Tinggi di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020



Grafik 4.8 : Komplikasi Ditangani per wilayah Puskesmas di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

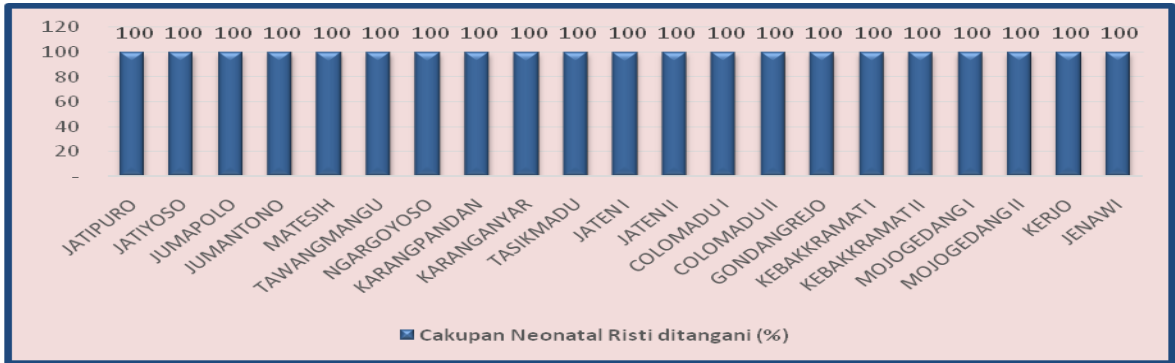


2. Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani

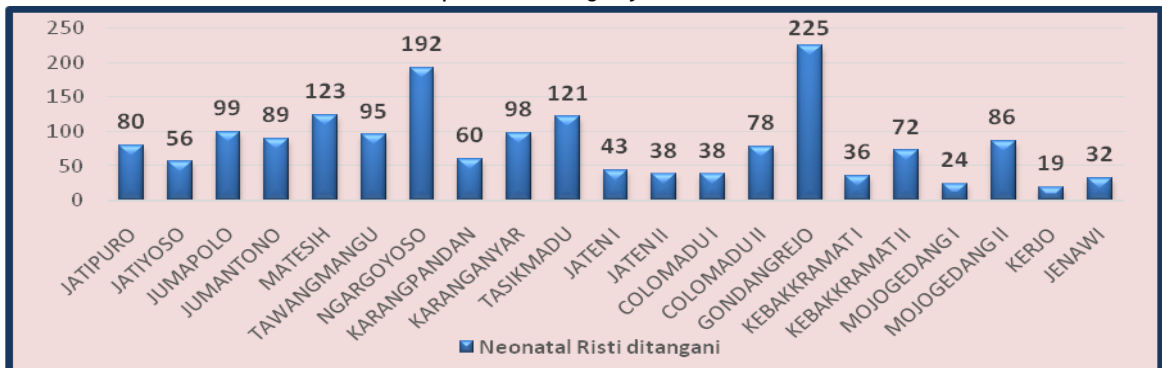
Neonatal dengan komplikasi adalah keadaan neonatal yang mengancam kehidupannya, misalnya Asfeksia, BBLR, Tetanus, Infeksi dan lain-lain. Cakupan neonatal resti/komplikasi tertangani di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebesar 1.704 (100%) sedang tahun 2019 sebesar 1.726 (94,3%), tahun 2018 sebesar 1.559 (87%), tahun 2017 sebesar 1.625 (87%), dan tahun 2016 sebesar 1.663 (87,6%).

Capaian cakupan neonatal resti/komplikasi ditangani di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 di seluruh Puskesmas sudah mencapai 100% dengan jumlah penanganan komplikasi tertinggi di Puskesmas Gondangrejo sebesar 225 dan terendah di Puskesmas Kerjo sebesar 19.

Grafik4.9 : Cakupan Neonatal Resiko Tinggi ditangani Kabupaten Karanganyar Tahun 2020



Grafik4.10 : Komplikasi Neonatal yang ditangani per wilayah Puskesmas di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020



3. Pelayanan Gawat Darurat

a. Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat Yang Dapat Diakses Masyarakat

Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat adalah cakupan sarana kesehatan yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standart dan dapat diakses masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Kemampuan pelayanan gawat darurat yang dimaksud adalah upaya cepat dan tepat untuk segera mengatasi puncak kegawatan yaitu henti jantung dan resusitasi jantung-paru-otak (*Cardio-Pulmonary-Cebral-Resucitation*), agar kerusakan organ yang terjadi dapat dihindarkan atau ditekan sampai minimal dengan menggunakan Bantuan Hidup Dasar (*Basic Life Support*) dan Bantuan Hidup Lanjut (ALS). Sedang yang dimaksud sarana kesehatan adalah rumah bersalin, puskesmas dan rumah sakit.

Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 adalah 21 puskesmas dengan rincian 15 puskesmas rawat inap dan 6 puskesmas non rawat inap, dan ada 8 rumah sakit dengan rincian 1 rumah sakit umum daerah (RSUD), 4 rumah sakit umum swasta, 1 rumah sakit TNI/Polri, 1 rumah sakit khusus bedah, dan 1 rumah sakit ibu dan anak.

b. Pemenuhan Darah di Rumah Sakit

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Tranfusi Darah adalah upaya kesehatan berupa segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memungkinkan penggunaan darah bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang mencakup kegiatan-kegiatan pengerahan penyumbangan darah, pengambilan, pengamanan, pengolahan, penyimpanan dan penyampaian darah kepada pasien melalui sarana pelayanan kesehatan.

B. AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

1. Cakupan Rawat Jalan

Cakupan rawat jalan adalah cakupan kunjungan rawat jalan baru di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan rawat jalan di sarana Kesehatan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 sebesar 595.121 kunjungan, sedang tahun 2019 sebesar 641.217 kunjungan, tahun 2018 sebesar 713.110 kunjungan, tahun 2017 sebesar 948.247 kunjungan, dan tahun 2016 sebesar 884.157 kunjungan.

2. Cakupan Rawat Inap

Cakupan rawat inap adalah cakupan kunjungan rawat inap baru di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan rawat inap di sarana kesehatan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 sebesar 46.285 kunjungan, sedang tahun 2019 sebesar 50.385 kunjungan, tahun 2018 sebesar 45.125 kunjungan, tahun 2017 sebesar 50.302 kunjungan, dan tahun 2016 sebesar 55.485 kunjungan.

3. Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pelayanan gangguan jiwa adalah pelayanan pada pasien yang mengalami gangguan kejiwaan, yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir, dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya. Data yang masuk untuk pelayanan kesehatan jiwa ini berasal dari sektor pemerintah dan swasta. Dari data yang ada, cakupan pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebesar 6.052 kunjungan, sedang tahun 2019 sebesar 2.174 kunjungan, tahun 2018 sebesar 4.719 kunjungan, tahun 2017 sebesar 3.365 kunjungan, dan tahun 2016 sejumlah 2.712 jiwa.

4. Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Laboratorium Kesehatan

Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan laboratorium kesehatan yang dapat diakses masyarakat adalah cakupan sarana kesehatan yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan sesuai standart dan dapat diakses masyarakat dalam waktu tertentu. Kemampuan pelayanan laboratorium yang dimaksud adalah upaya pelayanan medik untuk mendukung pelayanan medik dalam menegakkan diagnosa dokter.

Sarana pelayanan kesehatan dasar dengan kemampuan pelayanan laboratorium kesehatan yang dapat diakses masyarakat di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sejumlah 29 sarana, yaitu Rumah Sakit Umum sejumlah 7 Rumah Sakit, rumah sakit khusus sejumlah 1 Rumah Sakit dan 21 Puskesmas.

5. Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan 4 Pelayanan Kesehatan Spesialis Dasar

Rumah Sakit yang menyelenggarakan 4 Pelayanan Kesehatan Spesialis 4 (empat) dasar pelayanan kesehatan spesialis dasar meliputi spesialis bedah, spesialis dalam, spesialis anak dan spesialis kandungan.

Berdasarkan data tahun 2020, dari 8 rumah sakit yang ada di Kabupaten Karanganyar 5 rumah sakit (62,5%) diantaranya memiliki 4 (empat) pelayanan kesehatan spesialis dasar. Berikut ini Tabel Pelayanan Kesehatan Spesialis Rumah Sakit Tahun 2020 :

*Tabel 4.1 Pelayanan Kesehatan Spesialis Rumah Sakit
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020*

Rumah Sakit	4 Pelayanan Kesehatan Spesialis Dasar			
	Spesialis OBGYN	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Dalam
RSUD Karanganyar	✓	✓	✓	✓
RS Muhammadiyah	✓	✓	✓	✓
RS Jati Husada	✓	✓	✓	✓
RS Indo Sehat	✓	✓	✓	✓
RSIA Dian Pertiwi	✓	✓	✓	✓
RS dr. Siswanto Lanud Adi Sumarmo	✓	✓	-	✓
RS Mojosongo	✓	-	✓	✓
RS Jafar Medika	-	-	✓	✓

6. Sarana kesehatan dengan kemampuan Gawat Darurat Level 1

Sarana kesehatan dengan kemampuan Gawat Darurat Level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum on site (berada di tempat) 24 jam dengan kualifikasi GELS dan/atau ATLS + ACLS serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

Berdasarkan data tahun 2020, terdapat 23 sarana kesehatan dengan kemampuan Gawat Darurat Level 1 yang meliputi 7 rumah sakit umum, 1 rumah sakit khusus serta 15 puskesmas rawat inap.

C. **PEMBINAAN KESEHATAN LINGKUNGAN**

1. **Rumah/ Bangunan**

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah haruslah sehat dan nyaman agar penghuninya dapat berkarya untuk meningkatkan produktivitas. Kondisi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor resiko sumber penularan berbagai jenis penyakit khususnya penyakit yang berbasis lingkungan.

Secara umum rumah dikatakan sehat apabila memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah bebas jentik nyamuk. Bebas jentik nyamuk disini terutama bebas jentik nyamuk *Aedes Aegypti* yang merupakan vektor penyakit demam berdarah dengue. Penyakit demam berdarah dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *aedes aegypti*. Penyakit ini dapat menyerang semua orang dan dapat mengakibatkan kematian terutama pada anak serta sering menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah.

Nyamuk *Aedes Aegypti* ini hidup dan berkembang biak pada tempat-tempat penampungan air bersih yang tidak langsung berhubungan dengan tanah seperti bak mandi/ wc, minuman burung, air tandon, air tempayan/ gentong, kaleng, ban bekas dan lain-lain. Kasus demam berdarah di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebanyak 291 kasus, sedang tahun 2019 sebanyak 176 kasus, tahun 2018 sebanyak 77 kasus, tahun 2017 sebanyak 184 kasus, dan tahun 2016 sebanyak 441 kasus.

Jumlah rumah/bangunan yang ada di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebanyak 239.003 unit, sedang tahun 2019 sebanyak 238.638 unit, tahun 2018 sebanyak 228.434 unit, tahun 2017 sebanyak 223.887 unit, dan tahun 2016 sebanyak 220.178 unit. Rumah/ bangunan yang ada dan memenuhi syarat/rumah sehat di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebanyak 203.713 unit (85,23%).

2. **Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM)**

Pengawasan sanitasi tempat umum bertujuan untuk mewujudkan kondisi tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan agar masyarakat pengunjung terhindar dari kemungkinan bahaya penularan penyakit serta tidak menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat disekitarnya.

Tempat pengelolaan makanan adalah suatu bangunan yang menetap dengan segala karyawandan peralatan yang dipergunakan untuk membuat dan menjual makanan bagi konsumen yang meliputi restoran, rumah makan, snack bar, tempat penjualan minuman dingin, industri rumah tangga makanan minuman.

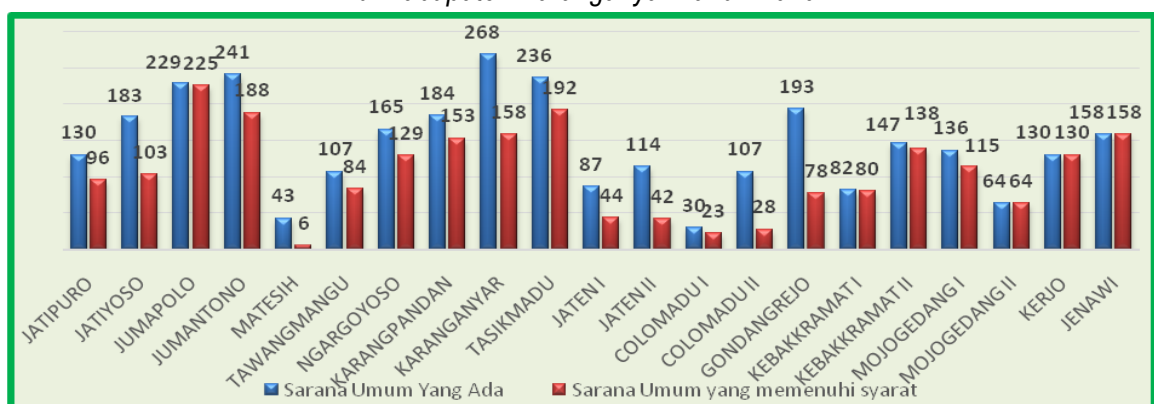
Resiko dari pengelolaan makanan mempunyai peluang yang sangat besar dalam penularan penyakit karena jumlah konsumen relative banyak dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu perlu teknologi dan metode yang lebih tepat untuk pembiayaan dan pengawasannya.

Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum meliputi : sarana wisata, sarana ibadah, sarana transportasi, sarana ekonomi dan sosial. Sarana wisata meliputi : hotel berbintang, hotel melati/Losmen, salon/pangkas rambut, usaha rekreasi , hiburan umum dan gedung pertemuan/gedung pertunjukan. Sarana lbadah meliputi : masjid/mushola, gereja, klenteng, pura, wihara. Sarana transportasi meliputi : terminal, stasiun, dan pelabuhan udara/bandara. Sarana ekonomi dan sosial meliputi : pasar, pusat pembelanjaan, apotik, sarana/pantisosial, sarana pendidikan dan sarana kesehatan. Berikut ini tabel jumlah sarana umum yang ada di Kabupaten Karanganyar dan yang diperiksa tahun 2020.

Tabel 4.2 Jumlah Sarana Umum yang Ada dan Diperiksa di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

No	Nama Sarana	Jumlah	Memenuhi Syarat Kesehatan	
			Jumlah	% sehat
1	Sarana Pendidikan	658	521	79,17
2	Sarana Kesehatan	32	32	100
3	Tempat Ibadah	2.301	1.670	72,6
4	Pasar	43	11	25,6
Jumlah		3.034	2.234	73,6

Grafik4.11 : Jumlah Sarana Umum yang Ada dan Diperiksaper wilayah Puskesmas di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020



3. Sarana Kesehatan Lingkungan (Persediaan Air Bersih, Jamban, Tempat Sampah, Pengelolaan Air Limbah)

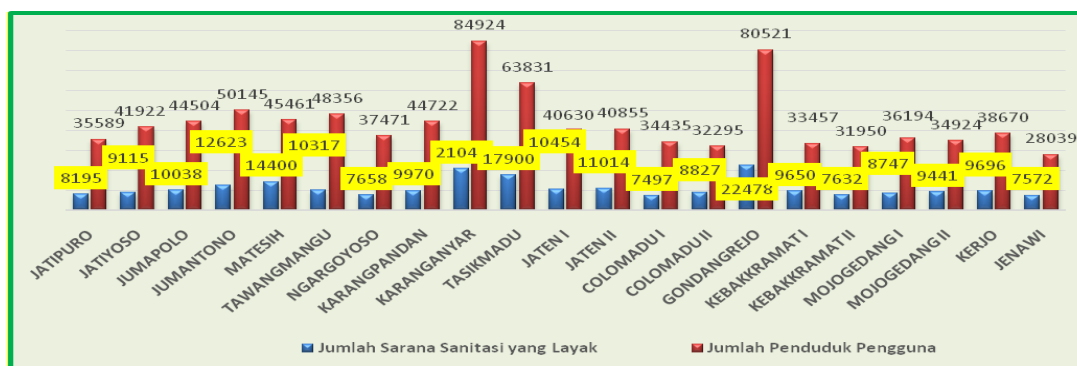
Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan sebagaimana jumlah sarana air minum sebanyak 224.823 sarana, sedang yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 1.311 sarana dan yang memenuhi syarat 1.231 sarana (93,9%).

Pembuangan kotoran / sampah, air limbah dan tinja yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menyebabkan rendahnya kualitas air, serta dapat menimbulkan penyakit menular di masyarakat. Jamban, tempatsampah, pengelolaan limbah dan persediaan air bersih merupakan sarana lingkungan pemukiman. Berikut ini tabel jumlah keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasidasar di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

Tabel 4.3 Jumlah Sarana Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) dan Jumlah Pengguna Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

No.	Jenis Sarana	Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna
1	Sharing/Komunal	2.737	9.070
2	Leher Angsa / JSP	228.557	908.141
4	Cemplung / JSSP	2.972	11.684

Grafik4.12 : Jumlah Sarana Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) dan Jumlah Pengguna per wilayah Puskesmasdi Kabupaten Karanganyar Tahun 2020



D. PEMBINAAN PERILAKU HIDUP MASYARAKAT

1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Menurut HL Blum, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah faktor perilaku. Dengan mewujudkan perilaku yang sehat, diharapkan dapat

menurunkan angka kesakitan suatu penyakit dan angka kematian ibu dan anak akibat terlambat /kurangnya kesadaran dalam mengunjungi sarana pelayanan kesehatan.

Dalam rangka merubah perilaku masyarakat kepada perilaku yang sehat, maka telah dilaksanakan kegiatan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Dalam kegiatan PHBS terdiri dari beberapa sasaran kegiatan yaitu PHBS tatanan institusi, tempat-tempat umum dan rumah tangga, dimana tatanan rumah tangga dianggap merupakan tatanan yang mempunyai daya ungkit paling besar terhadap perubahan perilaku masyarakat secara umum.

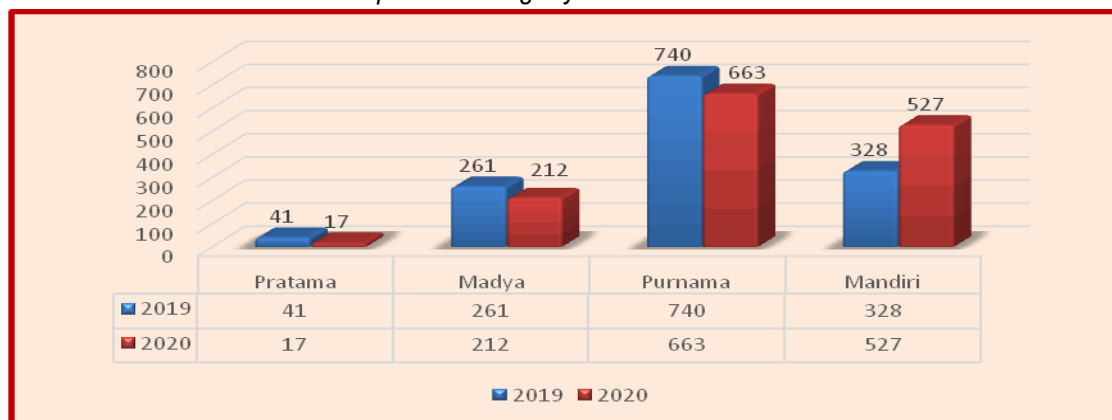
Berdasarkan hasil dari laporan Puskesmas pada tahun 2020 dari 239.783 jumlah seluruh rumah yang dibina dan yang memenuhi syarat rumah tangga sehat sebanyak 226.580 (94,49%), sedang tahun 2019 dari 238.638 jumlah seluruh yang dibinadan yang memenuhi syarat rumah sehat sebanyak 200.159 (83,88%), tahun 2018 dari 202.501 jumlah rumah yang dipantau danyang memenuhi syarat rumah sehat sebanyak 182.723 (90%), tahun2017 dari 206.389 jumlah rumah yang dipantau dan yang memenuhi syarat rumah sehat sebanyak 184.351 jumlah (89,32%), dan tahun 2016 dari 183.952 rumah yang dipantaudan yang memenuhi syarat rumah sehat sebanyak 162.523 (88,35%).

2. Posyandu

Posyandu adalah kegiatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana posyandu menjadi tanggung jawab kita bersama terutama masyarakat di sekitarnya. Dari tahun ke tahun peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan melalui kegiatan posyandu semakin baik.

Berdasarkan hasil laporan Puskesmas tahun 2020 tercatat 1.419 posyandu, sedang tahun 2019 tercatat 1.370 posyandu, tahun 2018 tercatat 1.411 posyandu, tahun2017 tercatat 1.407 posyandu, dan tahun 2016 tercatat 1.402 posyandu. Dari jumlah posyandu yang ada pada tahun 2020,jumlah posyandu yang tercatat sebagai posyandu aktif 1.224 (86,3%). Berikut Jumlah posyandu menurut strata (Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri)Kabupaten Karanganyar tahun 2019 dan tahun 2020.

Grafik 4.13 Posyandu menurut Strata Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2020



3. ASI Eksklusif

Air Susu Ibu merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung Zat Gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, karena itu untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal ASI perlu diberikan secara eksklusif sampai umur 6 bulan dan dapat dilanjutkan sampai anak berumur 2 tahun.

Kebijakan nasional untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan telah ditetapkan dalam PP No. 33 Tahun 2012 tentang ASI. ASI eksklusif adalah Air Susu Ibu yang diberikan kepada bayi sampai bayi berusia 6 bulan tanpa diberikan makanan dan minuman, kecuali obat dan vitamin. Bayi yang mendapat ASI eksklusif adalah bayi yang hanya mendapat ASI saja sejak lahir sampai usia 6 bulan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Pada tahun 2020 pemberian ASI eksklusif tercatat sebesar 7.146 bayi atau 69% dari jumlah bayi umur 0-6 bulan sebanyak 10.359 bayi, sedang tahun 2019 pemberian ASI eksklusif tercatat sebesar 6.673 bayi atau 64,1% dari jumlah bayi umur 0-6 bulan sebanyak 12.198 bayi, tahun 2018 pemberian ASI eksklusif tercatat sebesar 6.534 bayi atau 62,3% dari jumlah bayi umur 0-6 bulan sebanyak 10.483 bayi, tahun 2017 pemberian ASI eksklusif tercatat sebesar 6.382 bayi atau 61,6% dari jumlah bayi umur 0-6 bulan sebanyak 10.356 bayi, dan tahun 2016 pemberian ASI eksklusif tercatat sebesar 7.024 bayi atau 61,1 persen dari jumlah bayi umur 0-6 bulan sebanyak 11.488 bayi. Menurut analisis situasi yang telah dilakukan, rendahnya cakupan ASI eksklusif di Kabupaten Karanganyar dikarenakan antara lain :

- a. Pemasaran susu formula masih gencar dilakukan untuk bayi 0-6 bulan yang tidak ada masalah medis.
- b. Masih banyaknya perusahaan yang memperkerjakan perempuan tidak memberi kesempatan bagi ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan untuk melaksanakan pemberian ASI secara eksklusif. Hal ini terbukti dengan belum tersedianya ruang laktasi dan perangkat pendukungnya.
- c. Masih banyak tenaga kesehatan ditingkat layanan yang belum peduli atau belum berpihak pada pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif, yaitu masih mendorong untuk memberi susu formula pada bayi 0-6 bulan.
- d. Masih sangat terbatasnya tenaga konselor ASI.
- e. Belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kampanye terkait pemberian ASI, dan belum semua rumah sakit melaksanakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM).

- **Situasi Sumber Daya Kesehatan**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sumber daya di bidang kesehatan segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi

dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

A. SARANA KESEHATAN

Tabel 5.1 : Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2016–2020

No	JENIS SARANA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Puskesmas dengan rawat inap	13	13	13	13	15
2	Puskesmas tanpa rawat inap	8	8	8	8	6
3	Puskesmas Pembantu	57	57	57	57	56
4	Puskesmas keliling	28 ¹⁾	28 ¹⁾	27 ¹⁾	27 ¹⁾	27
5	Posyandu	1.402	1.402	1.411	1.370	1419
6	PKD	158 ²⁾	158 ²⁾	158 ²⁾	158 ²⁾	160
7	Rumah Sakit Umum	6	6	6	6	7
8	Rumah Sakit Khusus	2	2	2	2	1
9	Apotik Pemerintah	1	1	1	1	1
10	Apotik Swasta	107	107	123	81	155
11	Klinik Pratama	32	32	37	39	43
12	Klinik Utama	6	6	6	3	8

Keterangan :

1. 1 Puskesmas keliling dalam proses diusulkan lelang.
2. Jumlah PKD tahun 2019 adalah jumlah PKD yang berfungsi aktif memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karanganyar.
3. Sesuai Permenkes No.9 tahun 2014 tentang sarana kesehatan, yaitu untuk sarana rumah bersalin, balai pengobatan/klinik, dan praktek dokter bersama berubah menjadi klinik pratama dan klinik utama.

1. Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan sarana pelayanan kesehatan di tingkat dasar. Puskesmas di Kabupaten Karanganyar terdiri dari puskesmas perawatan dan puskesmas non perawatan, sedangkan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan PKD (Poliklinik Kesehatan Desa).

Jumlah Puskesmas Kabupaten Karanganyar tahun 2020 yaitu 21 Puskesmas, yang meliputi 15 puskesmas rawat inap dan 6 puskesmas non rawat inap. Jumlah puskesmas

pembantu (pustu) adalah 56 dan puskesmas keliling (Pusling) sebanyak 27. Sarana Pelayanan kesehatan dasar di desa yaitu PKD sebanyak 160 buah. Posyandu sebanyak 1.419, dan jumlah Desa Siaga Aktif sejumlah 177 desa yang ada.

2. Rumah Sakit

Tahun 2020 Rumah sakit umum di Kabupaten Karanganyar seluruhnya berjumlah 8 buah dengan perincian 5 rumah sakit milik swasta yaitu RSUD Muhammadiyah Karanganyar, RSUD Jati Husada, RSUD Jafar Medika, RSUD Mojosongo 2 dan RSUD Indo Sehat. Rumah Sakit milik pemerintah daerah serta milik TNI AU yaitu RSUD Karanganyar dan RSUD dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo. Selain Rumah Sakit umum, terdapat 1 rumah sakit khusus yaitu RSUD Dian Pertiwi (rumah sakit ibu dan anak). Dalam menilai kinerja rumah sakit, indikator yang digunakan adalah :

a. Pemakaian Tempat Tidur (Bed Occupancy Rate/BOR)

Bed Occupation Rate (BOR) yang ideal untuk suatu rumah sakit adalah antara 60% sampai dengan 80%. Persentase rata-rata pemakaian tempat tidur rumah sakit di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 adalah 46%, sedang tahun 2019 adalah 59,5%, tahun 2018 adalah 47,6%, tahun 2017 adalah 63,8%, dan tahun 2016 adalah 63,8%. BOR tertinggi di RSUD Muhammadiyah Karanganyar yaitu sebesar 84,7%.

b. Rata-rata lama rawat seorang pasien /Average Length of Stay (ALOS)

Average Length Of Stay (ALOS) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien yang secara umum nilai ALOS ideal antara 6-9 hari. ALOS di rumah sakit di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebesar 3 hari, sedang tahun 2019 sebesar 3,1 hari, tahun 2018 sebesar 3,4 hari, tahun 2017 sebesar 3,4 hari, dan tahun 2016 sebesar 3,6 hari. Nilai LOS tertinggi terjadi di RSUD Karanganyar yaitu sebesar 4 hari.

c. Rata-rata Hari Tempat Tidur Tidak Ditempati (TOI)

Turn Of Interval (TOI) adalah rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati. Angka ideal untuk TOI adalah 1-3 hari. TOI untuk Rumah Sakit di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 adalah 4 hari, sedang tahun 2019 adalah 2 hari, tahun 2018 adalah 3,6 hari, tahun 2017 adalah 1,8 hari, dan tahun 2016 adalah 1,8 hari. Rata-rata tempat tidur tidak ditempati paling lama di RSUD Jafar Medika yaitu 14 hari.

d. Angka Kematian Umum Penderita Yang Dirawat Di Rumah Sakit / Gross Death Rate (GDR)

GDR adalah angka kematian untuk tiap-tiap penderita keluar. Angka yang dapat ditolerir maksimum 45. Rata-rata GDR rumah sakit di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebesar 26, sedang tahun 2019 sebesar 20,7, tahun 2018 sebesar 15,6, tahun 2017 sebesar 27,7, dan tahun 2016 sebesar 21. GDR tertinggi di Kabupaten Karanganyar tahun 2019 di RSUD Muhammadiyah Karanganyar yaitu sebesar 35.

e. Angka Kematian Penderita Yang Dirawat < 48 Jam / Net Death Rate (NDR)

NDR adalah angka kematian lebih atau sama dengan 48 jam. Nilai NDR yang dapat ditolerir adalah 25 per 1.000 penderita keluar. NDR Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebesar 14 hari, sedang tahun 2019 sebesar 12 hari, tahun 2018 sebesar 10,1 hari, tahun 2017 sebesar 16,3 hari, dan tahun 2016 sebesar 13,7 hari. NDR tertinggi di Kabupaten Karanganyar tahun 2019 adalah di RSUD Karanganyar yaitu sebesar 20 hari. Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa NDR di Rumah Sakit di Kabupaten Karanganyar masih dapat ditolerir.

3. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang berhasil didata oleh bidang promkesi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar terdiri atas Desa Siaga, Poskesdes/PKD dan Posyandu. Jumlah desa siaga aktif di kabupaten Karanganyar sebanyak 177 desa/kelurahan (100% dari total desa yang ada). Desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan secara mandiri. Pada tahun 2020, jumlah UKBM yang berbentuk PKD sebanyak 160 buah dan posyandu seluruhnya berjumlah 1.419posyandu.

III. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Sumber Daya Manusia Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Untuk mencukupi tenaga kesehatan, dilakukan dengan cara membuka penerimaan CPNS baru baik tenaga pusat yang ditempatkan di daerah (kebijakan sebelum otonomi daerah), maupun yang sekarang dilakukan yaitu secara swakelola/pengangkatan oleh Pemerintah Daerah. Usulan lain dalam mencukupi kekurangan tenaga kesehatan juga dilakukan pengangkatan dokter tidak tetap, Bidan Tidak Tetap, pegawai kontrak, tenaga harian lepas (THL) maupun lewat tenaga magang, dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tenaga Kesehatan menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

a. Jenis Tenaga Kesehatan

Tabel 5.2 : Karakteristik Pegawai berdasar Jenis Tenaga di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2020

No	Jenis Tenaga PNS dan Non PNS	2018	2019	2020	Keterangan
1	Dokter spesialis	90	81	122	

2	Dokter umum	112	235	330	
3	Dokter gigi	44	32	54	
4	Sarjana Kesehatan Masyarakat	16	21	16	SKM dan M.Kes (non struktural)
5	Perawat	695	873	993	PNS dan Non PNS
6	Bidan	495	626	651	PNS, Non PNS dan PTT
7	Tenaga Gizi	34	40	45	
8	Tenaga Kesehatan lingkungan	31	39	54	
9	Tenaga Kefarmasian	118	143	200	SAA,D3, S1 dan S2
10	Tenaga Analis Laboratorium (Analis Kesehatan)	71	77	115	
11	Tenaga Fisioterapis	41	43	49	

Sumber : Profil SDM Kesehatan tahun 2020 Kabupaten Karanganyar

Dari tabel diatas terjadi peningkatan maupun penurunan jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Data tersebut bersumber baik dari instansi pemerintah (Puskesmas & Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan RSUD Lanud Adisumarmo) maupun swasta (Rumah Sakit swasta, Institusi Diknakes, RB/BP maupun sarana kesehatan lainnya). Berikut tabel Analisis rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Karanganyar tahun 2020.

Tabel 5.3 : Analisis Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

No	JENIS TENAGA PNS dan NON PNS	Standart Rasio Tenaga kesehatan per 100.000 penduduk	Jumlah Penduduk 2020	Jumlah Tenaga Sekarang	Rasio Tenaga 2019	Rasio Tenaga 2020
1	Dokter spesialis	10	934.303	122	8,8	13,1
2	Dokter Umum	40	934.303	330	25,4	35,3
3	Dokter Gigi	12	934.303	54	3,5	5,8
4	Sarjana Kesehatan Masyarakat	13	934.303	16	2,3	1,7
5	Perawat	158	934.303	993	94,3	106,3
6	Bidan	100	934.303	651	67,6	69,7

7	Tenaga Gizi	10	934.303	45	4,3	4,8
8	Tenaga Kesehatan Lingkungan	15	934.303	54	4,2	5,8
9	Tenaga Kefarmasian	18	934.303	200	15,5	21,4
10	Tenaga Analis Laboratorium	15	934.303	115	8,3	12,3
11	Tenaga Fisioterapis	10	934.303	49	4,6	5,2

Dari tabel di atas, hasil analisis Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa selain Dokter Spesialis dan Tenaga Kefarmasian, semua jenis tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Karanganyar, baik yang ada di lingkup pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan & Puskesmas, RS Lanud Adi Sumarmo) maupun swasta (RS swasta, Institusi Diknakes, RB/BP maupun sarana kesehatan lainnya) masih kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan dalam Standart Rasio Indonesia Sehat 2010.

B. PEMBIAYAAN KESEHATAN

1. Persentase Anggaran Kesehatan Dalam APBD Kabupaten

Pembiayaan kesehatan pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan swasta. Alokasi dana yang berasal dari pemerintah untuk upaya kesehatan dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, baik pusat maupun daerah, terus diupayakan peningkatan dan kecukupannya sesuai kebutuhan menuju sekurang-kurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya (SKN : 2009). Pembiayaan kesehatan (Dinas Kesehatan, RSUD Karanganyar dan Puskesmas) yang dibiayai APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sejumlah Rp. 339.952.387.455,-. Anggaran kesehatan tersebut digunakan untuk belanja langsung sejumlah Rp194.112.373.000,- dan belanja tidak langsung sejumlah Rp101.328.914.000,-, sedangkan anggaran yang bersumber dari APBN (DAK) sejumlah Rp22.749.128.000,-, dan yang bersumber dari DBHCHT, Pajak Rokok dan anggaran lainnya sejumlah Rp. Rp22.749.128.000,-. Sehingga total anggaran kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar sejumlah Rp362.701.515.455,-.

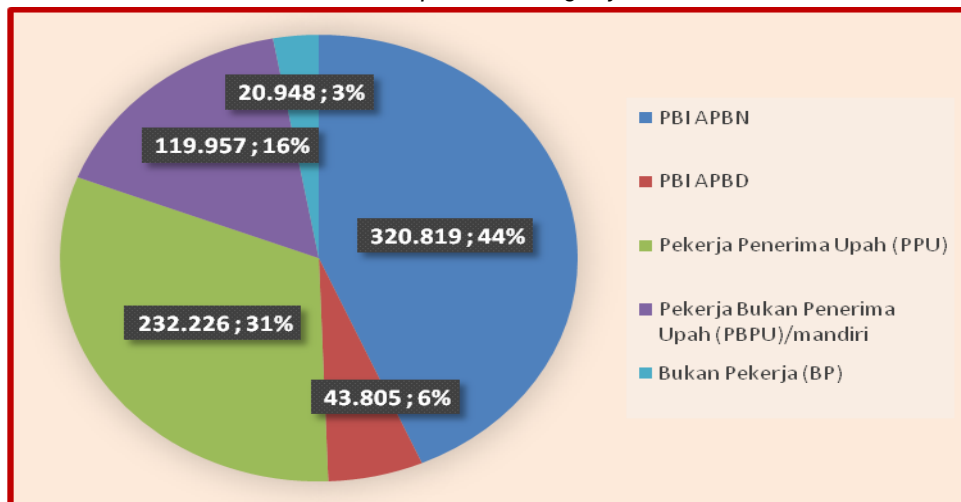
Walaupun demikian, kelemahan dari data yang disajikan adalah bahwa data yang kaitannya dengan anggaran baru menyentuh 3 instansi pemerintah yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas, sementara dari SKPD lain, seperti, Dinas Pekerjaan Umum yang mempunyai andil dalam PAMSIMAS, Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai peran dalam pemulihan kualitas mata air, BP3AKB dalam pembinaan KB belum dapat ditampilkan disini. Demikian pula peran tiap SKPD yang mempunyai anggaran untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), belum dapat dihitung secara rinci. Hal ini

dikarenakan keterbatasan anggaran dalam melakukan penghitungan pembiayaan kesehatan kabupaten yang sering dikenal dengan istilah DHA (*District Health Account*).

2. Cakupan Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan merupakan suatu upaya pemeliharaan kesehatan secara paripurna, terstruktur yang menjamin kesinambungan dan mutunya, dimana pembiayaannya dilaksanakan secara pra upaya. Berdasarkan data tahun 2020 dari jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar sejumlah 934.303 jiwa, jumlah peserta jaminan kesehatan JKN Nasional 737.755 jiwa (78,96%), Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN 320.819 jiwa, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD 43.805 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) 232.226 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri 119.957 jiwa, Bukan Pekerja (BP) 20.948 jiwa. Berikut ini diagram yang menggambarkan cakupan peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Karanganyar tahun 2020:

Grafik 5.1: Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan Pra Bayar di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020



Dari grafik diatas, cakupan terbesar peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Karanganyar adalah yang dicakup JKN Nasional. Hal ini disebabkan seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar terlindungi oleh JKN Nasional, sementara yang belum tercover dalam Jamkesmas masuk dalam Jamkesda.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

IV.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Karanganyar adalah meningkatkan status derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH).

IV.2 Sasaran Perangkat Daerah

1. Menurunnya angka kematian di sasaran prioritas, dengan indikator :
 - a. Angka Kematian Ibu/ 100.000 Kelahiran Hidup
 - b. Angka Kematian Neonatus/ 1.000 Kelahiran Hidup
 - c. Angka Kematian Bayi/ 1.000 Kelahiran Hidup
 - d. Angka Kematian Balita/ 1.000 populasi balita
2. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi
 - a. Nilai SAKIP

Tabel 16

Tujuan Menengah Dinas Kesehatan dan Sasaran Jangka

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN		TARGET		
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		UHH (th)	77,38	77,47	77,60	77,63	77,84
	Menurunnya angka kematian di sasaran prioritas	AKI/100.000 Kelahiran Hidup	< 49,41	< 65	< 80	< 80	< 75
		AKN/ 1.000 Kelahiran Hidup	< 5,1	< 5	< 7	< 7	< 7
		AKB/1.000 Kelahiran Hidup	< 8,36	< 8,4	< 10	< 10	< 9,7
		AKBA / 1.000 populasi balita	< 2,38	< 2,46	< 5	< 5	< 5
	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	Nilai SAKIP	79,89	80,14	75	77	80

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, maka strategi dikembangkan dengan 5 Progam, Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan parameter / indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rincian program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

e. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

f. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
- 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

g. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

h. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

i. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - j. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - k. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - l. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - m. Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan :
 - 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Kegiatan :
- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - 1) Pembangunan Puskesmas
 - 2) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 3) Pengembangan Rumah Sakit
 - 4) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
 - 6) Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 7) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 8) Pengadaan Obat, Vaksin
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - 15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - 16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 17) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
 - 19) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - 20) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - 21) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - 22) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 - 23) Operasional Pelayanan Puskesmas
 - 24) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 25) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
 - 26) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Sub Kegiatan :
- 1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - 2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 - 3) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan :

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Kegiatan :

- a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub Kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 2) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

- c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Sub Kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

- d. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Sub Kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
- e. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Sub Kegiatan :
 - 1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
 - 2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Kegiatan :
 - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 - c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - 1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Rencana program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagaimana terlampir.

(Terlampir)

BAB V

PENUTUP

Untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dibidang pelayanan kesehatan agar lebih berdayaguna dan berhasil guna efektif dan efisien, setiap awal tahun anggaran kami menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai sarana untuk melaksanakan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam mendukung keberhasilan pembangunan secara umum serta khususnya dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022. kami susun dengan harapan semoga dapat terlaksana dengan baik, bermanfaat bagi masyarakat dan semua pihak yang terkait serta mendapat Ridho dari Tuhan yang Maha Esa, Amin.

Karanganyar, Agustus 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR



Purwati, SKM, M.Kes

Pembina

NIP. 19730723 199303 2 005

**BAR CODE PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**



REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 2022

UNIT ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
SUB UNIT ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA				PAGU INDIKATIF 2022 (Rp)	PERKIRAAN MAJU 2023 (Rp)	KETERANGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN		
Ur	BU	Pr	Kg	SK					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
									TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										386,831,834,000	528,317,204,800	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masvaraka								386,831,834,000	528,317,204,800	
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman											
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan											
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%					287,274,864,500	284,518,570,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
									Nilai SAKIP	75%							Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1	02	001	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1			Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	761,028,500	650,000,000	
1	2	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1	DINKES		Terwujudnya dokumen perencanaan program	4 dokumen	Dokumen perencanaan program tersusun	100%	449,230,000	300,000,000	
1	2	1	02:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2	DINKES		Tersusunnya RKA penetapan dan perubahan SKPD	2 dokumen	RKA penetapan dan perubahan SKPD tersusun	100%	25,000,000	25,000,000	
1	2	1	02:01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3	DINKES		Tersusunnya DPA penetapan dan perubahan SKPD	2 dokumen	DPA penetapan dan perubahan SKPD tersusun	100%	25,000,000	25,000,000	
1	2	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4	DINKES		Terwujudnya dokumen laporan (jenis)	6 dokumen	Dokumen laporan tersusun	100%	112,786,000	150,000,000	
1	2	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5	DINKES		Terwujudnya dokumen SPIP dan Reformasi Birokrasi	2 dokumen	Dokumen SPIP dan Reformasi Birokrasi tersusun	100%	149,012,500	150,000,000	
1	02	001	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2			Terealisasi capaian anggaran OPD	82%	Terealisasi capaian anggaran OPD	82%	110,345,214,500	98,935,000,000	
1	2	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1	DINKES		Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	Gaji dan tunjangan ASN terbayarkan	100%	109,683,922,000	98,000,000,000	
1	2	1	02:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2	DINKES		Tersusunnya dokumen laporan keuangan	5 dokumen	Dokumen laporan keuangan tersusun	100%	250,000,000	375,000,000	
1	2	1	02:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			3	DINKES		Tersusunnya laporan bulanan BLUD berupa SP3PB	12 bulan	Laporan bulanan BLUD berupa SP3PB tersusun	100%	220,000,000	300,000,000	
1	2	1	02:02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			4	DINKES		Terlaksananya Prognosis Realisasi Anggaran BLUD	1 dokumen	Terwujudnya Prognosis Realisasi Anggaran BLUD	100%	191,292,500	260,000,000	
1	2	1	02:02								Terlaksananya pembinaan BLUD	1 kali	Pembinaan BLUD terlaksana	100%			
1	02	001	02:03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3			Tersusunnya dokumen BMD sesuai standar	100%	Tersusunnya dokumen BMD sesuai standar	100%	200,000,000	300,000,000	
1	2	1	02:03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1	DINKES		Tersusunnya laporan semesteran	1 dokumen	Tersusunnya laporan semesteran	100%	200,000,000	300,000,000	
1	2	1	02:03								Tersusunnya dokumen persediaan dan aset tetap (jenis)	2 dokumen	Tersusunnya dokumen persediaan dan aset tetap (jenis)	100%			
1	02	001	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4			Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai	100%	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai	100%	170,200,000	275,000,000	
1	2	1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			1	DINKES		persentase tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	persentase tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	-	50,000,000	
1	2	1	02:05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			2	DINKES		persentase Terlaksanakannya pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan	100%	persentase Terlaksanakannya pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan	100%	25,200,000	120,000,000	
1	2	1	02:05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			3	DINKES		Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasi	3 kegiatan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasi	100%	100,000,000	75,000,000	
1	2	1	02:05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			4	DINKES		terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 kegiatan	terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	45,000,000	30,000,000	
1	02	001	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			5			Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100%	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100%	521,365,000	525,000,000	
1	2	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1	DINKES		Kelancaran koordinasi dan komunikasi (penyediaan makan minum rapat/kegiatan)	12 bulan	Terlaksananya koordinasi dan komunikasi (penyediaan makan minum rapat/kegiatan)	100%	291,365,000	200,000,000	
											tersedianya Extra fooding petugas keamanan	12 bulan	Extra fooding petugas keamanan terealisasi	100%			
											Tersedianya ATK Kantor	1 paket	ATK Kantor tersedia	100%			
1	2	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2	DINKES		Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	1 paket	Barang cetak dan penggandaan tersedia	100%	50,000,000	75,000,000	

1	2	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3	DINKES			Presentase jumlah draft produk hukum bidang kesehatan	100%	Jumlah draft produk hukum bidang kesehatan tersusun	100%	30,000,000	75,000,000		
1	2	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4	DINKES			Presentase Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral dan Laporan hasil perjalanan dinas (kali)	100%	Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral dan Laporan hasil perjalanan dinas (kali)	100%	150,000,000	175,000,000		
1	02	001	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana OPD	100%	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana OPD	100%	6,157,295,000	330,000,000		
1	2	1	02:07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1	DINKES			Terlaksananya pembelian mobil vaksin	1 unit	Terbeli mobil vaksin	100%	5,320,495,000	300,000,000		
1	2	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2	DINKES			Tersedianya peralatan gedung kantor	1 unit	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	836,800,000	30,000,000		
1	02	001	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7				Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100%	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100%	759,920,000	730,000,000		
1	2	1	02:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	DINKES			Terlaksananya jasa surat kabar	12 bulan	Jasa surat kabar terlaksana	100%	33,320,000	30,000,000		
											Terlaksananya Kelancaran surat menyurat	12 bulan	Kelancaran surat menyurat	100%				
											Terlaksananya pengiriman surat/dokumen/paket	2000 surat	Pengiriman surat/dokumen/paket terlaksana	100%				
1	2	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2	DINKES			Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telpon, dan internet	12 bulan	Jasa pelayanan listrik, air, telpon, dan internet terbavarkan	100%	726,600,000	700,000,000		
1	02	001	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8				Persentase terpeliharanya sarana prasarana barang milik daerah	100%	Persentase terpeliharanya sarana prasarana barang milik daerah	100%	323,400,000	450,000,000		
1	2	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1	DINKES			Terpeliharanya kendaraan Dinas (roda 4)	12 bulan	Persentase Terpeliharanya kendaraan Dinas (roda 4)	100%	133,400,000	150,000,000		
											Jumlah kendaraan yang proses perizinan/pajak kendaraan dinas/operasional	12 bulan	presentase jumlah kendaraan yang proses perizinan/pajak kendaraan dinas/operasional	100%				
1	2	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2	DINKES			Tepeliharanya gedung kantor (gedung)	12 bulan	persentase Tepeliharanya gedung kantor (gedung)	100%	120,000,000	150,000,000		
1	2	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3	DINKES			Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor (Genset, AC, komputer, printer, telepon, air, listrik, wifi, LCD, dll)	12 bulan	persentase terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor (Genset, AC, komputer, printer, telepon, air, listrik, wifi, LCD, dll)	100%	70,000,000	150,000,000		
1	02	001	02:10		Peningkatan Pelayanan BLUD		9				Nilai IKM	81%	Nilai IKM	81%	168,036,441,500	182,323,570,000		
1	2	1	02:10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		1	RSUD			Nilai IKM	78	Nilai IKM	78	122,000,000,000	130,000,000,000		
1	2	1	02:10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						Kinerja Pelayanan Puskesmas	81	Kinerja Pelayanan Puskesmas	81	46,036,441,500	52,323,570,000		
															1,965,100,000	2,369,116,000		
															2,592,369,000	2,479,426,000		
															2,491,377,000	2,865,890,000		
															2,880,900,000	2,974,078,000		
															2,255,000,000	3,113,741,000		
															2,034,500,000	2,316,111,000		
															2,104,545,000	2,481,847,000		
															2,644,701,000	3,265,454,000		
															2,587,000,000	3,057,786,000		
															2,259,000,000	2,759,579,000		
															1,789,800,000	1,951,195,000		
															1,277,160,000	1,346,629,000		
															1,408,289,000	1,637,787,000		
															1,170,891,500	1,325,537,000		
															2,770,552,000	3,504,363,000		
															3,002,958,000	3,472,793,000		
															1,397,137,000	1,353,102,000		
															2,733,508,000	2,874,661,000		
															1,426,000,000	1,848,471,000		
															3,053,490,000	2,814,144,000		
															2,192,164,000	2,511,860,000		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		2				Persentase fasyankes yang terakreditasi minimal utama	35%				94,302,403,750	237,451,640,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
											Prosentase penyakit potensial KLB yang ditangani	100%						Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
											Persentase Balita Gizi Buruk	<0.3%						
											Persentase Desa STBM	29%						
											Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi penilaian	100%						
											Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan	35%						
											Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%						
											Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%						
											Persentase Pelayanan Kesehatan Babi Baru Lahir	100%						
											Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100%						
											Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%						
											Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%						
											Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%						

				Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%										
				Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100%										
				Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%										
				Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%										
				Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%										
1	02	002	02:01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1				realisasi pengadaan sarana prasarana pelayanan kesehatan	100%	realisasi pengadaan sarana prasarana pelayanan kesehatan	100%	45,107,474,750	155,570,543,000	
1	2	2	02:01	2	Pembangunan Puskesmas	1	DINKES		Jumlah puskesmas Non rawat inap yang dibangun	2 unit	Puskesmas Non rawat inap yang dibangun	100%	15,000,000,000	15,000,000,000	
1	2	2	02:01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	DINKES		Jumlah puskesmas rawat inap yang dibangun	2 unit	Puskesmas rawat inap yang dibangun	100%			
1	2	2	02:01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		RSUD		Pembangunan/penyempurnaan bangunan kesehatan sesuai standar	1 unit	Pembangunan/penyempurnaan bangunan kesehatan sesuai standar	100%	6,850,000,000	1,500,000,000	
1	2	2	02:01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		RSUD		Pembangunan Food Court RSUD	1 paket	Pembangunan Food Court RSUD	70%	-	200,000,000	
1	2	2	02:01	5	Pengembangan Rumah Sakit		RSUD		Pembangunan Gedung VK dan Perinatologi	1 paket	Pembangunan Gedung VK dan Perinatologi	75%	5,000,000,000	99,088,910,000	
1	2	2	02:01	5	Pengembangan Rumah Sakit		RSUD		Pembangunan Gedung Rawat Jalan	1 paket	Pembangunan Gedung Rawat Jalan	100%			
1	2	2	02:01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		DINKES		P4TO Berfungsi standar	25%	P4TO Berfungsi standar	100%	100,000,000	300,000,000	
1	2	2	02:01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		RSUD		Pengembangan/penataan tempat parkir	1paket	Pengembangan/penataan tempat parkir	75%	-	2,000,000,000	
1	2	2	02:01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		RSUD		Pembangunan Doorlop gedung rawat jalan	1paket	Pembangunan Doorlop gedung rawat jalan	40%			
1	2	2	02:01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		RSUD		Penataan Taman dan Halaman di Lingkungan Rumah Sakit	1paket	Penataan Taman dan Halaman di Lingkungan Rumah Sakit	60%			
1	2	2	02:01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		RSUD		Pembangunan Saluran dan Trotoar	1paket	Pembangunan Saluran dan Trotoar	10%			
1	2	2	02:01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		RSUD		Rehabilitasi Pagar RSUD	1paket	Rehabilitasi Pagar RSUD	71%	-	800,000,000	
1	2	2	02:01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		DINKES		Terlaksananya sewa tanah Puskesmas Colomadu II	12 bulan	Terlaksananya sewa tanah Puskesmas Colomadu II	100%	150,000,000	40,000,000	
1	2	2	02:01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		RSUD		Peningkatan Green Hospital untuk RS ramah lingkungan	1 p%	Peningkatan Green Hospital untuk RS ramah lingkungan	25%	-	400,000,000	
1	2	2	02:01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		DINKES		Ketersediaan data alat kesehatan yang sesuai dengan kondisi Fasilitas pelayanan kesehatan	12 bulan	Ketersediaan data alat kesehatan yang sesuai dengan kondisi Fasilitas pelayanan kesehatan	100%	9,279,017,227	5,500,000,000	
1	2	2	02:01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		DINKES		Pemenuhan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di Puskesmas	12 bulan	Pemenuhan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di Puskesmas	100%			
1	2	2	02:01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		DINKES		Tersedianya alat laboratorium kesehatan	1 paket	Tersedianya alat laboratorium kesehatan	100%			
1	2	2	02:01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		RSUD		Ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	1 paket	Prosentase Ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	100%	1,200,000,000	23,666,633,000	
1	2	2	02:01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		DINKES		Prosentase Kalibrasi alat Kesehatan terpenuhi	55%	Prosentase Kalibrasi alat Kesehatan terpenuhi	50%	26,419,400	75,000,000	
1	2	2	02:01	16	Pengadaan Obat, Vaksin		DINKES		Ketersediaan Obat di Puskesmas	85%	Ketersediaan Obat di Puskesmas	100%	7,502,038,123	7,000,000,000	
									Persentase ketersediaan obat perbekalan kesehatan sesuai standar	80%	Persentase ketersediaan obat perbekalan kesehatan sesuai standar	100%			
									Persentase pelayanan farmasi di Fasyankes sesuai standar	14%	Persentase pelayanan farmasi di Fasyankes sesuai standar	100%			
									Persentase penggunaan obat rasional di Fasyankes sesuai standar	33%	Persentase penggunaan obat rasional di Fasyankes sesuai standar	100%			
									Persentase sarana produksi dan distribusi sarana farmasi sesuai standar	60%	Persentase sarana produksi dan distribusi sarana farmasi sesuai standar	100%			
									Persentase distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke Puskesmas sesuai kebutuhan	93%	Persentase distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke Puskesmas sesuai kebutuhan	100%			
									Prosentase LPLPO Puskesmas yang dapat terlayani	93%	Prosentase LPLPO Puskesmas yang dapat terlayani	100%			
									Prosentase obat rusak/kadaluarsa dapat dimusnahkan	85%	Prosentase obat rusak/kadaluarsa dapat dimusnahkan	100%			
									standar mutu gudang penyimpanan obat terpenuhi	76%	standar mutu gudang penyimpanan obat terpenuhi	100%			
									Prosentase obat an perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan dapat terpenuhi	85%	Prosentase obat an perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan dapat terpenuhi	100%			
									Prosentase rencana kebutuhan obat tersusun tepat waktu	93%	Prosentase rencana kebutuhan obat tersusun tepat waktu	100%			
									Puskesmas memenuhi standar penulisan obat generik	82%	Puskesmas memenuhi standar penulisan obat generik	100%			
									Tersedia bahan baku obat tradisional yang terstandar	30%	Tersedia bahan baku obat tradisional yang terstandar	100%			
									Tersedianya obat, BMHP dan sarana prasarana penunjang pelayanan kefarmasian	12 bulan	Tersedianya obat, BMHP dan sarana prasarana penunjang pelayanan kefarmasian	100%			

1	02	002	02:02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2			Persentase penderita penyakit yang mendapatkan akses penanganan sesuai standar	100%	Persentase penderita penyakit yang mendapatkan akses penanganan sesuai standar	100%	47,782,269,000	79,471,097,000
1	2	2	02:02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	DINKES	Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (K4=95%)	75%	Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (K4=95%)	75%	388,473,000	600,000,000
1	2	2	02:02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2	DINKES	persentase jaminan ibu hamil miskin tidak mampu yang belum memiliki jaminan	100%	persentase jaminan ibu hamil miskin tidak mampu yang belum memiliki jaminan	100%	645,101,000	3,100,000,000
1	2	2	02:02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3	DINKES	Persentase puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	90%	Persentase puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	90%	94,270,000	650,000,000
1	2	2	02:02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	4	DINKES	persentase puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	92%	persentase puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	92%	91,206,000	150,000,000
1	2	2	02:02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5	DINKES	Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan anak remaja	80%	Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan anak remaja	80%	97,010,000	150,000,000
								Persentase Sekolah Dasar (SD-SMP sederajat) yang melaksanakan pelayanan penjangkaran sesuai standar	94%	Persentase Sekolah Dasar (SD-SMP sederajat) yang melaksanakan pelayanan penjangkaran sesuai standar	94%		
1	2	2	02:02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6	DINKES	persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94%	persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94%	72,000,000	230,000,000
1	2	2	02:02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7	DINKES	Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan Usia Lanjut	75%	Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan Usia Lanjut	75%	79,750,000	125,000,000
1	2	2	02:02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8	DINKES	Cakupan penderita HT yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85%	Cakupan penderita HT yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85%	85,000,000	180,000,000
1	2	2	02:02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9	DINKES	Prosentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95%	Prosentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95%	36,280,000	180,000,000
1	2	2	02:02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10	DINKES	prosentase penderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	prosentase penderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	95,000,000	300,000,000
1	2	2	02:02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11	DINKES	Angka keberhasilan Pengobatan (Success Rate)penderita TBC	90%	Angka keberhasilan Pengobatan (Success Rate)penderita TBC	90%	115,373,000	1,500,000,000
								Cakupan pengobatan semua kasus TBC (CDR) TBC	39%	Cakupan pengobatan semua kasus TBC (CDR) TBC	39%		
1	2	2	02:02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	12	DINKES	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	94%	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	94%	126,627,000	1,650,000,000
1	2	2	02:02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	13	DINKES	Cakupan desa/ kelurahan terjangkau KLB ditangani	100%	Cakupan desa/ kelurahan terjangkau KLB ditangani	100%	376,540,000	110,000,000
1	2	2	02:02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14	DINKES	Persentase Puskesmas cakupan remaja putri mendapat tablet tambah darah >80%	100%	Persentase Puskesmas cakupan remaja putri mendapat tablet tambah darah >80%	100%	573,697,000	800,000,000
								Persentase Puskesmas capaian Kadarzi >85%	80%	Persentase Puskesmas capaian Kadarzi >85%	80%		
								Persentase Puskesmas yang cakupan pemberian Vit A pada balita 100%	100%	Persentase Puskesmas yang cakupan pemberian Vit A pada balita 100%	100%		
								Persentase Puskesmas yang capaian ASI eksklusif minimal 65%	50%	Persentase Puskesmas yang capaian ASI eksklusif minimal 65%	50%		
1	2	2	02:02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15	DINKES	Persentase puskesmas yang memberikan pembinaan pada kelompok olahraga	50%	Persentase puskesmas yang memberikan pembinaan pada kelompok olahraga	50%	109,145,000	100,000,000
								Persentase puskesmas yang mengembangkan Pos UKK	10%	Persentase puskesmas yang mengembangkan Pos UKK	10%		
1	2	2	02:02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16	DINKES	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar	50%	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar	50%	296,300,000	200,000,000
								Pengelolaan limbah medis laboratorium sesuai standar	70%	Pengelolaan limbah medis laboratorium sesuai standar	70%		
1	2	2	02:02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	17	DINKES	Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat	5 tema	Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat	5 tema	438,300,000	550,000,000
								Persentase puskesmas mengembangkan media promosi	10%	Persentase puskesmas mengembangkan media promosi	10%		
1	2	2	02:02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	18	DINKES	Persentase penyehat tradisional sesuai standar	10%	Persentase penyehat tradisional sesuai standar	10%	100,000,000	330,000,000
								Persentase Peran serta UKBM dalam asuhan mandiri toga	20%	Persentase Peran serta UKBM dalam asuhan mandiri toga	20%		
1	2	2	02:02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19	DINKES	Cakupan AFP Rate	100%	Cakupan AFP Rate	100%	149,020,000	220,000,000
								Cakupan Discarded Campak	100%	Cakupan Discarded Campak	100%		
								Cakupan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji	100%	Cakupan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji	100%		
								Prosentase Ketepatan SKDR Mingguan	99%	Prosentase Ketepatan SKDR Mingguan	99%		
1	2	2	02:02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20	DINKES	Cakupan kasus DBD yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE) dalam kurun waktu 1 tahun (100%)	100%	Cakupan kasus DBD yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE) dalam kurun waktu 1 tahun (100%)	100%	450,000,000	1,650,000,000

										Cakupan zoonozis dan ditangani sesuai standar (100%)	100%	Cakupan zoonozis dan ditangani sesuai standar (100%)	100%		
										Jumlah suspek malaria yang dilakukan pemeriksaan laboratorium	12 bulan	Jumlah suspek malaria yang dilakukan pemeriksaan laboratorium	12 bulan		
										Persentase Puskesmas dengan angka penemuan kasus diare >80%	67%	Persentase Puskesmas dengan angka penemuan kasus diare >80%	67%		
										Persentase Puskesmas dengan cakupan penemuan kasus pneumonia balita	67%	Persentase Puskesmas dengan cakupan penemuan kasus pneumonia balita	67%		
										Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B	100%	Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B	100%		
										Persentase semua kasus baru Kusta yang menyelesaikan pengobatan sesuai standart	100%	Persentase semua kasus baru Kusta yang menyelesaikan pengobatan sesuai standart	100%		
1	2	2	02:02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			21	DINKES	Jumlah kepesertaan yang dibayarkan Pemda	57500 jiwa	Jumlah kepesertaan yang dibayarkan Pemda	57500 jiwa	26,266,000,000	41,150,000,000
										Masyarakat beresiko kesehatan tertangani 100 %	100%	Masyarakat beresiko kesehatan tertangani 100 %	100%		
										Prosentase Fasyankes yang melayani JKN	71%	Prosentase Fasyankes yang melayani JKN	71%		
1	2	2	02:02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			22	DINKES	Persentase puskesmas yang aktif melakukan intervensi sesuai IKS	60%	Persentase puskesmas yang aktif melakukan intervensi sesuai IKS	60%	-	2,376,275,000
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			23		Nilai IKS Puskesmas	40%	Nilai IKS Puskesmas	40%	16,277,177,000	19,119,822,000
									PUSKESMAS					819,510,000	811,644,000
									PUSKESMAS					706,474,000	901,886,000
									PUSKESMAS					621,697,000	992,128,000
									PUSKESMAS					706,474,000	931,967,000
									PUSKESMAS					649,970,000	901,886,000
									PUSKESMAS					791,251,000	811,644,000
									PUSKESMAS					791,251,000	841,725,000
									PUSKESMAS					734,733,000	1,052,156,000
									PUSKESMAS					762,992,000	962,180,000
									PUSKESMAS					819,510,000	931,967,000
									PUSKESMAS					762,992,000	871,805,000
									PUSKESMAS					847,769,000	871,805,000
									PUSKESMAS					876,028,000	1,052,156,000
									PUSKESMAS					960,805,000	992,128,000
									PUSKESMAS					706,474,000	901,886,000
									PUSKESMAS					791,251,000	871,805,000
									PUSKESMAS					791,251,000	811,644,000
									PUSKESMAS					847,769,000	871,805,000
									PUSKESMAS					762,992,000	841,725,000
									PUSKESMAS					791,251,000	1,082,236,000
									PUSKESMAS					734,733,000	811,644,000
1	2	2	02:02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			24	DINKES	% kasus tertangani sesuai standar	91%	% kasus tertangani sesuai standar	91%	400,000,000	600,000,000
1	2	2	02:02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			25	DINKES	Puskesmas yang memenuhi syarat akreditasi	100%	Puskesmas yang memenuhi syarat akreditasi	100%	275,000,000	3,100,000,000
										Puskesmas dengan kinerja mutu minimal 8,5	90%	Puskesmas dengan kinerja mutu minimal 8,5	90%		
										Puskesmas dengan nilai IKM > 80	60%	Puskesmas dengan nilai IKM > 80	60%		
										FKTP memenuhi syarat akreditasi	100%	FKTP memenuhi syarat akreditasi	100%		
										RS yang memenuhi syarat akreditasi	80%	RS yang memenuhi syarat akreditasi	80%		
1	2	2	02:02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			26	DINKES	UCL Desa	100%	UCL Desa	100%	145,000,000	250,000,000
										Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	95%	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	95%		
1	2	2	02:02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			26	DINKES	Persentase penderita penyakit yang mendapatkan akses penanganan sesuai standart	100%	Persentase penderita penyakit yang mendapatkan akses penanganan sesuai standart	100%	-	100,000,000
1	02	002	02:03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			3		Terealisasinya sistem informasi kesehatan secara Terintegrasi	100%	Terealisasinya sistem informasi kesehatan secara Terintegrasi	100%	283,360,000	400,000,000
1	2	2	02:03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1	DINKES	Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan SIK sesuai standar	28%	Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan SIK sesuai standar	28%	283,360,000	400,000,000
1	02	002	02:04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4		Prosentase fasyankes yang berizin	100%	Prosentase fasyankes yang berizin	100%	1,129,300,000	2,010,000,000
1	2	2	02:04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			1	DINKES	persentase Klinik yang mendapatkan rekomendasi ijin operasional	100%	persentase Klinik yang mendapatkan rekomendasi ijin operasional	100%	15,000,000	50,000,000
										persentase Rumah Sakit Kelas C dan D yang mendapatkan rekomendasi ijin operasional	100%	persentase Rumah Sakit Kelas C dan D yang mendapatkan rekomendasi ijin operasional	100%		
1	2	2	02:04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			2	DINKES	% Fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam memenuhi standar pelayanan	45%	% Fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam memenuhi standar pelayanan	45%	957,100,000	1,360,000,000
										Meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan sehingga bisa tercapai kualitas yang baik sesuai standar mutu yang ditetapkan	60%	Meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan sehingga bisa tercapai kualitas yang baik sesuai standar mutu yang ditetapkan	60%		
										Puskesmas dengan kinerja pelayanan minimal 91	70%	Puskesmas dengan kinerja pelayanan minimal 91	70%		
										% puskesmas yang melakukan survey KM	100%	% puskesmas yang melakukan survey KM	100%		
1	2	2	02:04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			3	DINKES	% rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan	100%	% rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan	100%	157,200,000	600,000,000

1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			3		Persentase tenaga medis sesuai kompetensi	35%						3,487,105,250	4,850,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
										Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi	35%								Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1	02	003	02:02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			1					terpenuhinya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan	100%	terpenuhinya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan	100%	3,312,705,250	3,350,000,000	
1	2	3	02:02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			1	DINKES				Persentase Jasa tenaga honorer dan THL di Dinas dan UPT terbavarkan	100%	Persentase Jasa tenaga honorer dan THL di Dinas dan UPT terbavarkan	100%	2,478,240,000	2,800,000,000	
													presentase terpenuhinya petugas keamanan kantor	100%	presentase terpenuhinya petugas keamanan kantor	100%			
													presentase terpenuhinya petugas kebersihan	100%	presentase terpenuhinya petugas kebersihan	100%			
1	2	3	02:02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			2	DINKES				Persentase jabatan fungsional kesehatan yang dilaksanakan penilaian angka kredit	100%	Persentase jabatan fungsional kesehatan yang dilaksanakan penilaian angka kredit	100%	834,465,250	550,000,000	
													presentase Terpilihnya tenaga kesehatan teladan	100%	presentase Terpilihnya tenaga kesehatan teladan	100%			
													Persentase Terselenggaranya pengembangan manajemen kepegawaian dengan baik	100%	Persentase Terselenggaranya pengembangan manajemen kepegawaian dengan baik	100%			
1	02	003	02:03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2					Persentase SDM tenaga kesehatan yang memenuhi Kompetensinya	100%	Persentase SDM tenaga kesehatan yang memenuhi Kompetensinya	100%	174,400,000	1,500,000,000	
1	2	3	02:03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	DINKES				persentase perizinan tenaga kesehatan	93%	persentase perizinan tenaga kesehatan	93%	174,400,000	1,500,000,000	
													persentase perizinan tenaga medis	97%	persentase perizinan tenaga medis	97%			
													persentase tenaga kesehatan sesuai standar rasio	22%	persentase tenaga kesehatan sesuai standar rasio	22%			
													persentase tenaga medis sesuai standar rasio	50%	persentase tenaga medis sesuai standar rasio	50%			
													terlaksananya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan	12 bulan	terlaksananya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan	100%			
													terlaksananya uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan	1 kali	terlaksananya uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan	100%			
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			4		Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian	35%						448,649,500	1,046,994,800	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
										Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan	100%								Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
										Persentase TPM yang memenuhi syarat	35%								
1	02	004	02:01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			1					Persentase fasyankes penunjang yang berizin	100%	Persentase fasyankes penunjang yang berizin	100%	85,208,000	254,000,000	
1	2	4	02:01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			1	DINKES				Persertanse sarana toko alkes dan optik yang memenuhi ketentuan	80%	Persertanse sarana toko alkes dan optik yang memenuhi ketentuan	80%	18,808,000	204,000,000	
1	2	4	02:01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		1	DINKES				Persertanse pengawasan sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan	100%	Persertanse pengawasan sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan	100%	6,400,000	25,000,000	
1	2	4	02:01	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			2	DINKES				persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, UMOT dsb yang memperoleh Rekomendasi Perizinan	100%	persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, UMOT dsb yang memperoleh Rekomendasi Perizinan	100%	60,000,000	25,000,000	
1	02	004	02:03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			2					Prosentase PIRT yang berijin	45%	Prosentase PIRT yang berijin	45%	164,446,500	102,994,800	
1	2	4	02:03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			1	DINKES				Persentase PIRT yang dilakukan IS	40%	Persentase PIRT yang dilakukan IS	40%	164,446,500	102,994,800	
													Persentase PIRT yang mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan	40%	Persentase PIRT yang mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan	40%			
1	02	004	02:04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			3					Persentase TPM mengikuti sertifikasi laik higiene sanitasi	100%	Persentase TPM mengikuti sertifikasi laik higiene sanitasi	100%	60,000,000	250,000,000	
1	2	4	02:04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			1	DINKES				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100%	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100%	60,000,000	250,000,000	
													Persentase TPM yang dibina	40%	Persentase TPM yang dibina	40%			

1	02	004	02:05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			4				Persentase TPM yang dibina	100%	Persentase TPM yang dibina	100%	20,000,000	250,000,000		
1	2	4	02:05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			1	DINKES			Persentase sentra makanan jajanan yang dibina	40%			20,000,000	250,000,000		
1	02	004	02:06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			5				Persentase PIRT berijin yang sudah dievaluasi	100%	Persentase PIRT berijin yang sudah dievaluasi	100%	118,995,000	190,000,000		
1	2	4	02:06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			1	DINKES			Persentase PIRT yang dilakukan IS	40%	Persentase PIRT yang dilakukan IS	40%	73,995,000	150,000,000		
1	2	4	02:06	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga			2	DINKES			persentase Industri Rumah Tangga yang memperoleh Rekomendasi Perizinan	100%	persentase Industri Rumah Tangga yang memperoleh Rekomendasi Perizinan	100%	45,000,000	40,000,000		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			5				Persentase Desa siaga Aktif	100%			1,318,811,000	450,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
												Persentase rumah tangga sehat	90%					Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
1	02	005	02:01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1				Realisasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100%	Realisasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100%	1,152,311,000	200,000,000		
1	2	5	02:01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1	DINKES			Jumlah desa siaga aktif mandiri	21%	Jumlah desa siaga aktif mandiri	21%	1,152,311,000	200,000,000		
												Persentase rumah tangga yang didata PHBS	65%	Persentase rumah tangga yang didata PHBS	65%				
1	02	005	02:02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2				Persentase gerakan preventif dan promotif bidang kesehatan	100%	Persentase gerakan preventif dan promotif bidang kesehatan	100%	116,500,000	150,000,000		
1	2	5	02:02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			1	DINKES			Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan pembinaan gerakan hidup bersih dan sehat	4 kelompok	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan pembinaan gerakan hidup bersih dan sehat	100%	116,500,000	150,000,000		
1	02	005	02:03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3				Persentase UKBM yang aktif	100%	Persentase UKBM yang aktif	100%	50,000,000	100,000,000		
1	2	5	02:03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1	DINKES			Jumlah UKBM yang dilakukan pembinaan	5 UKBM	Jumlah UKBM yang dilakukan pembinaan	100%	50,000,000	100,000,000		
												Persentase posyandu mandiri	15%	Persentase posyandu mandiri	15%				

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karanganyar

Purwati, SKM, M.Kes
NIP. 19730723 199303 2 005